



Katalog: 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2016



BADAN PUSAT STATISTIK



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2016



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS

2016

ISSN: 2088-5679

Nomor Publikasi: 04120.1604

Katalog: 2302004

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xxiv + 146 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh: -

.....
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik


KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode Februari 2011-Agustus 2014 dilaksanakan secara triwulanan, dan sejak Februari 2015 dilaksanakan secara semesteran. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara teratur dan berkesinambungan. Sakernas Februari menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan series *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Agustus 2015, Februari 2016, dan Agustus 2016. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai acuan mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Suhariyanto

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	XV
RINGKASAN EKSEKUTIF	XIX
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan.....	1
1.2. Sakernas dan KILM	4
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	7
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	11
BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA	15
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	15
KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>)	20
KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	26
KILM 4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	31
KILM 5. Pekerja Paruh Waktu.....	34
KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	42
KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal.....	47

BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN	53
KILM 8. Pengangguran	53
KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda.....	57
KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan.....	63
KILM 12. Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>)	71
KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	77
BAB 4 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	81
KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	81
PENJELASAN TEKNIS	87
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015–2016.....	26
Tabel 2.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015–2016.....	31
Tabel 3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2015–2016.....	54
Tabel 4.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2015–2016.....	61
Tabel 5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015–2016.....	65
Tabel 6.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015–2016.....	67
Tabel 7.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2015–2016.....	72
Tabel 8.	Indikator Setengah Penganggur, 2015–2016.....	73
Tabel 10.	Indikator Ketidakaktifan (persen), 2015–2016.....	77
Tabel 11.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2015–2016.....	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2015-2016.....	15
Grafik 2. TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2015-2016.....	16
Grafik 3. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016.....	17
Grafik 4. TPAK Menurut Provinsi (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016.....	19
Grafik 5. Employment to Population Ratio, 2015-2016.....	20
Grafik 6. Employment to Population Ratio Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016 ...	21
Grafik 7. Employment to Population Ratio Menurut Kelompok Umur, 2015-2016.....	22
Grafik 8. Employment to Population Ratio Menurut Kelompok Umur, Februari 2016 dan Agustus 2016.....	23
Grafik 9. Employment to Population Ratio Menurut Provinsi, Februari 2016 dan Agustus 2016.....	25
Grafik 10. Persentase Pekerja Rentan, 2015-2016.....	27
Grafik 11. Persentase Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2016.....	28
Grafik 12. Persentase Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari 2016 dan Agustus 2016.....	30
Grafik 13. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2016 dan Agustus 2016.....	33

Grafik 14. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2015-2016	34
Grafik 15. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2016.....	35
Grafik 16. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2015-2016	36
Grafik 17. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016.....	38
Grafik 18. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2015-2016	39
Grafik 19. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016.....	41
Grafik 20. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2015-2016	42
Grafik 21. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2016	43
Grafik 22. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2016	44
Grafik 23. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2016.....	46
Grafik 24. Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal, 2015-2016.....	48
Grafik 25. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2015-2016.....	49

Grafik 26. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016	50
Grafik 27. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal dan Provinsi, Agustus 2016.....	52
Grafik 28. TPT Menurut Provinsi (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016	56
Grafik 29. TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2015-2016 ...	57
Grafik 30. TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2016.....	58
Grafik 31. TPT Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2015-2016.....	59
Grafik 32. Share Penganggur Umur Muda (persen), 2015-2016.....	62
Grafik 33. TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015-2016	64
Grafik 34. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Agustus 2016.....	70
Grafik 35. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016.....	75
Grafik 36. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2016.....	79
Grafik 37. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari 2016 dan Agustus 2016.....	84

Grafik 38. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Agustus 2016..... 85

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2015–2016.....	117
Lampiran 2.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2015–2016.....	118
Lampiran 3.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2015–2016.....	119
Lampiran 4.	Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2015–2016.....	120
Lampiran 5.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2015–2016.....	121
Lampiran 6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2015–2016.....	122
Lampiran 7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2015–2016.....	123
Lampiran 8.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2015–2016	124

Lampiran 9.	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2015–2016	125
Lampiran 10.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2015–2016	126
Lampiran 11.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2015–2016.....	128
Lampiran 12.	Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2015–2016	129
Lampiran 13.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, 2015–2016.....	130
Lampiran 14.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2015–2016	131
Lampiran 15.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal/Informal, 2015–2016	134
Lampiran 16.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2015–2016	135

Lampiran 17. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), 2015–2016.....	136
Lampiran 18. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2015–2016.....	137
Lampiran 19. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2015–2016.....	138
Lampiran 20. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2015–2016.....	139
Lampiran 21. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2015–2016.....	140
Lampiran 22. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2015–2016.....	141
Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2015–2016	142
Lampiran 24. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2015–2016.....	143
Lampiran 25. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2015–2016.....	144

- Lampiran 26. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2015–2016145
- Lampiran 27. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal/Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama.....146

<http://www.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 mencapai 125,44 juta orang. Jumlah tersebut menurun sebanyak 2,23 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 (127,67 juta orang) dan meningkat sebanyak 3,06 juta orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2015 (122,38 juta orang).

Jumlah angkatan kerja yang turun pada periode Februari-Agustus 2016 seiring dengan turunnya TPAK yaitu dari 68,06 persen pada Februari 2016 menjadi 66,34 persen pada Agustus 2016. Begitu pula dengan yang terjadi pada periode Agustus 2015-Agustus 2016, kenaikan angkatan kerja juga diiringi kenaikan TPAK dari 65,76 persen pada Agustus 2015 menjadi 66,34 persen pada Agustus 2016.

Secara nasional angka EPR pada Agustus 2016 adalah sebesar 62,62. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada Agustus 2016 dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 63 orang yang bekerja. EPR ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 yaitu naik sebesar 0,92 poin, dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2016 yaitu turun sebesar 1,69 poin.

Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2016 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode Agustus 2015 dan Februari 2016. Persentase terbesar penduduk bekerja ditempati oleh penduduk dengan status berusaha (47,56 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (38,70 persen), dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (13,74 persen).

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia pada Agustus 2016 masih mempunyai pola yang sama dengan keadaan Agustus 2015 maupun Februari 2016, yaitu didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 46,69 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 31,90 persen, dan sektor manufaktur sebesar 21,41 persen.

Tingkat pekerja paruh waktu mencapai 19,64 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 20 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Agustus 2015 maupun Februari 2016, masing-masing menurun sebesar 1,76 persen poin dan 1,80 persen poin.

Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di atas 35 jam per minggu mencapai hampir lebih dari dua pertiga dari total

penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 29,09 persen, persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2016 (32,27 persen) maupun Agustus 2015 (31,60 persen) dengan penurunan masing-masing sebesar 3,18 persen poin dan 2,51 persen poin.

Dari 118,41 juta orang yang bekerja pada Agustus 2016, sebanyak 50,80 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (60,15 juta orang). Pada periode Agustus 2015, Februari 2016, dan Agustus 2016 tampak adanya fluktuasi persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2015 sebesar 51,72 persen, turun menjadi 50,74 persen pada Februari 2016, dan kembali turun pada Agustus 2016 menjadi 50,80 persen.

TPT mencapai 5,61 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015, namun bila dibandingkan dengan Februari 2016 mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 3, TPT Agustus 2016 mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2015 (6,18 persen) dan

mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan keadaan pada Februari 2016 (5,50 persen).

TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 19,45 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 19 orang yang menganggur. Angka tersebut menurun sebesar 3,15 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2015 dan meningkat sebesar 1,59 persen poin apabila dibandingkan dengan Februari 2016.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 9,63 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,46 persen.

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 33,66 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 34 orang. Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 yaitu dari 31,94 persen pada Februari 2016 menjadi 33,66 persen pada Agustus 2016. Sejalan dengan dengan penurunan tingkat ketidakaktifan, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan, sebanyak 3,72 juta orang dari

Februari 2016 (59,93 juta orang) ke Agustus 2016 (63,65 juta orang).

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Februari 2016. Angkatan kerja pada Agustus 2016 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 55,82 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 28,74 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 12,19 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 3,63 persen.

BAB 1 PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertujuan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia. Sejak Triwulan I Februari 2011 BPS menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei

(Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan. Sejak tahun 2015, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel Sakernas pada Agustus 2015 sekitar 200.000 rumah tangga, sedangkan pada Agustus 2016 sekitar 50.000 rumah tangga.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.2. Sakernas dan KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas, dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pengguna data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini

menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2. Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3. Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan Agustus 2016 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035.

4. Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011 hingga saat ini, petugas

Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5. Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6. Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

1. Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
2. Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO

bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*-OECD) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1. Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*)

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*) yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds*

working hours (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2. Pemantauan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs)

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3. Memantau Kesetaraan Gender di Pasar Tenaga Kerja

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4. Mengkaji Tenaga Kerja di Era Globalisasi

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya

penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudah dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13), bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja ataupun keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini

semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya, melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa" / *discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk menelaah total lapangan kerja dan menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), kemudian dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif?

Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

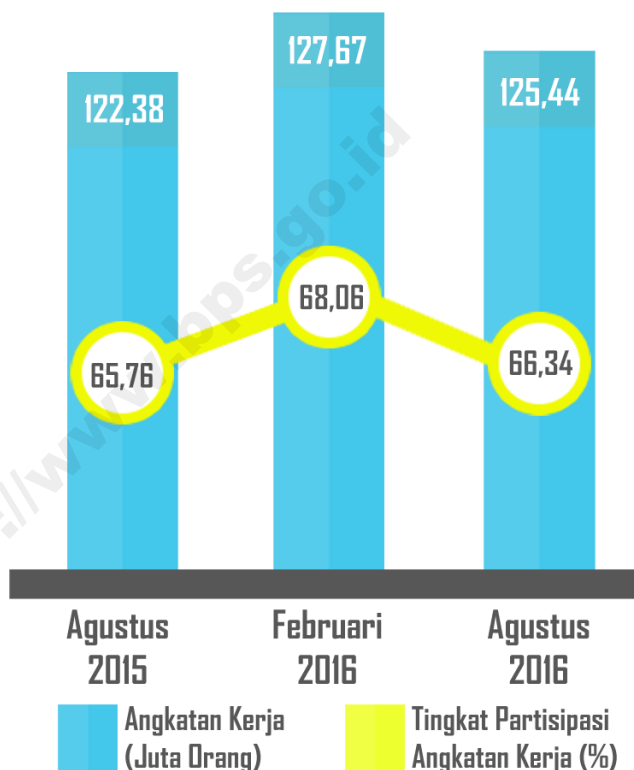
Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

“Jumlah angkatan kerja dan TPAK menurun”

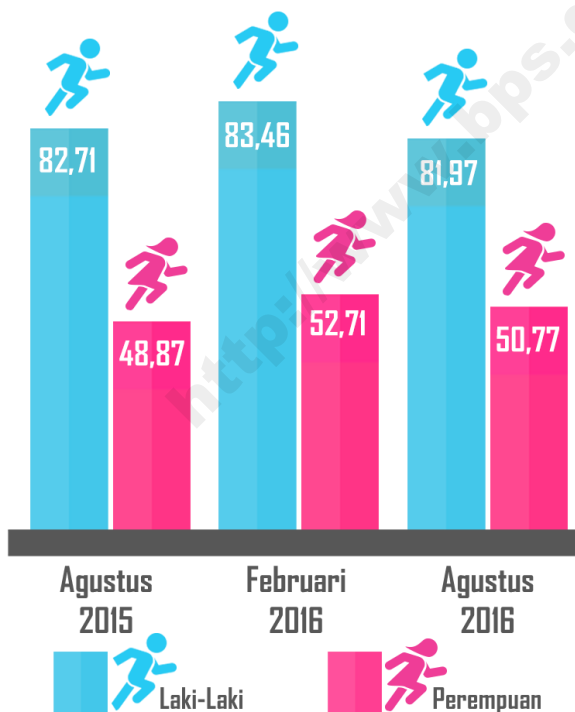
Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2015-2016



Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 mencapai 125,44 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 3,06 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 (122,38 juta orang) dan turun sebanyak

2,23 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 (127,67 juta orang). Kenaikan jumlah angkatan kerja pada periode Agustus 2015-Agustus 2016 seiring dengan naiknya TPAK yaitu dari 65,76 persen pada Agustus 2015 menjadi 66,34 persen pada Agustus 2016. Begitu pula dengan yang terjadi pada periode Februari 2016-Agustus 2016, penurunan angkatan kerja juga diiringi penurunan TPAK dari 68,06 persen pada Februari 2016 menjadi 66,34 persen pada Agustus 2016.

“TPAK laki-laki masih lebih tinggi dari TPAK perempuan”



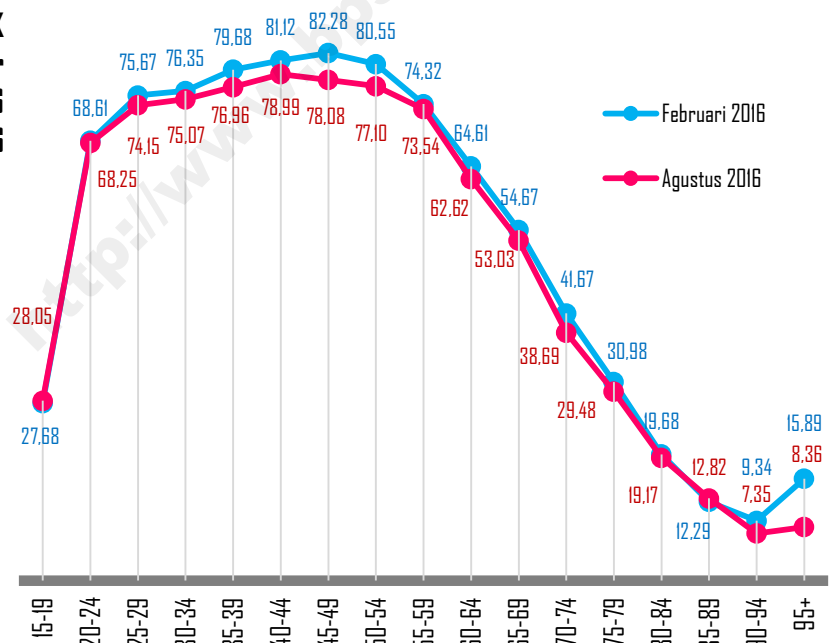
Grafik 2. TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2015-2016

Di Indonesia, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut terlihat pada keadaan Agustus 2015, Februari 2016, dan

Agustus 2016, dimana TPAK laki-laki sekitar 1,5 kali TPAK perempuan. Sebagai contoh, pada Agustus 2016 TPAK laki-laki mencapai 81,97 persen sementara pada perempuan hanya 50,77 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 82 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 51 orang yang termasuk angkatan kerja.

“Pada tiap kelompok umur, TPAK Agustus 2016 hampir selalu lebih rendah dari TPAK Februari 2016”

Grafik 3. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016



Secara total TPAK Februari 2016 lebih tinggi dari pada TPAK Agustus 2016, hal yang sama juga terjadi pada hampir

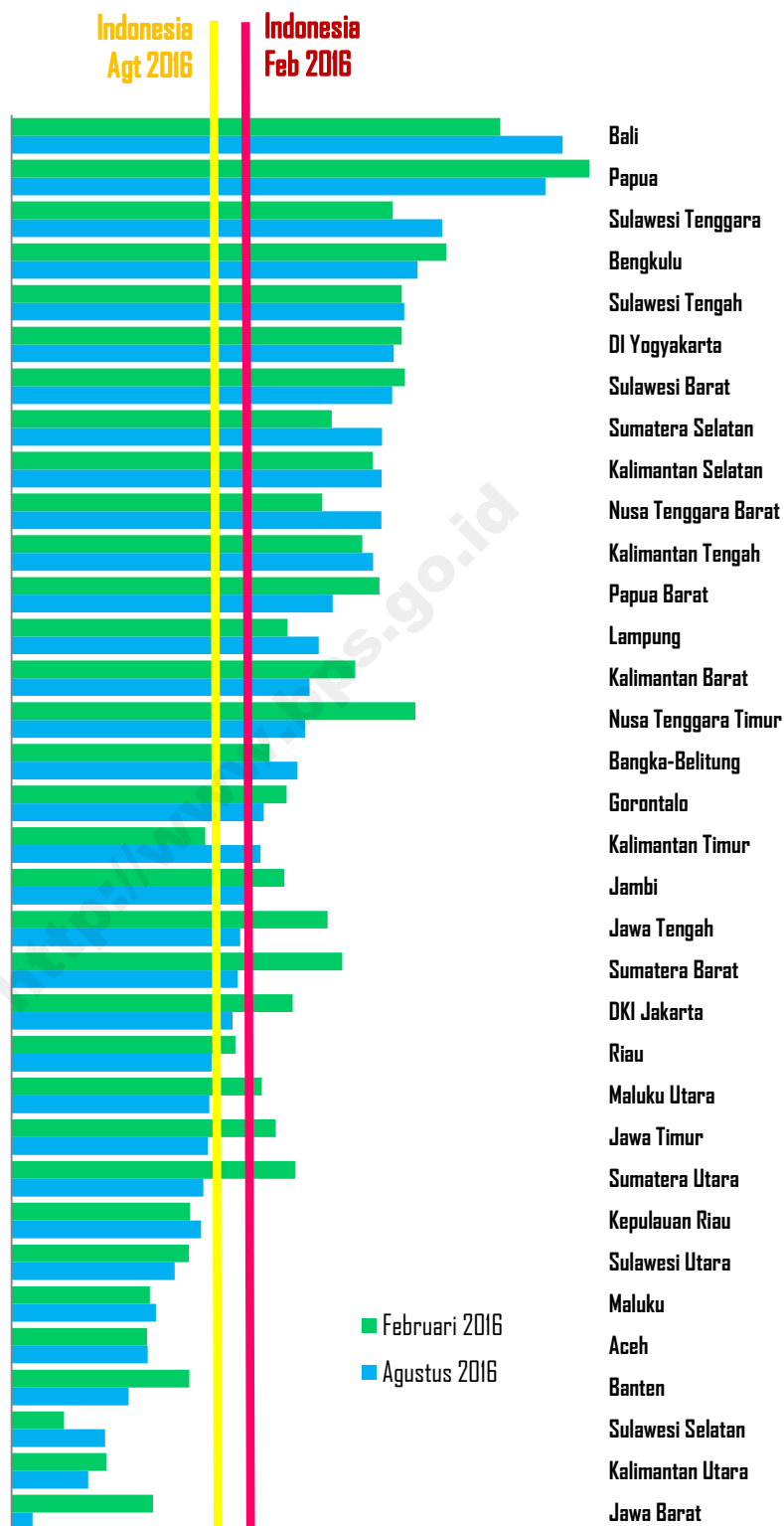
semua kelompok umur, kecuali kelompok umur 15-19 tahun dan kelompok umur 85-89 tahun.

“Agustus 2016: Bali, Papua, dan Sulawesi Tenggara memiliki TPAK tertinggi”

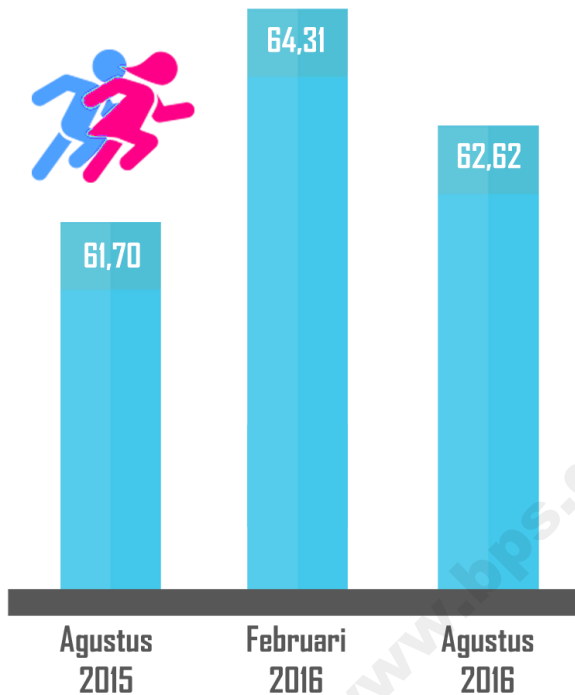
TPAK menurut provinsi berdasarkan Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Bali (77,24 persen), Provinsi Papua (76,70 persen), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (73,47 persen). Angka TPAK ketiga provinsi tersebut lebih tinggi daripada angka TPAK nasional sebesar 66,34 persen. Sedangkan pada TPAK nasional Februari 2016 (68,06 persen) dengan tiga provinsi yang memiliki TPAK tertinggi adalah Provinsi Papua (78,77 persen), Provinsi Bali (75,28 persen) dan Provinsi Bengkulu (73,59 persen).

Tiga urutan provinsi dengan TPAK terendah pada Sakernas Agustus 2016 ini diduduki oleh Provinsi Jawa Barat (60,65 persen), Provinsi Kalimantan Utara (62,40 persen), dan Provinsi Sulawesi Selatan (62,92 persen). Sedangkan tiga urutan provinsi dengan TPAK terendah pada Sakernas Agustus 2015 berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (61,64 persen), Provinsi Kalimantan Utara (62,96 persen), dan Provinsi Aceh (64,24 persen), lihat Lampiran 7.

Grafik 4. TPAK Menurut Provinsi (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016



KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)



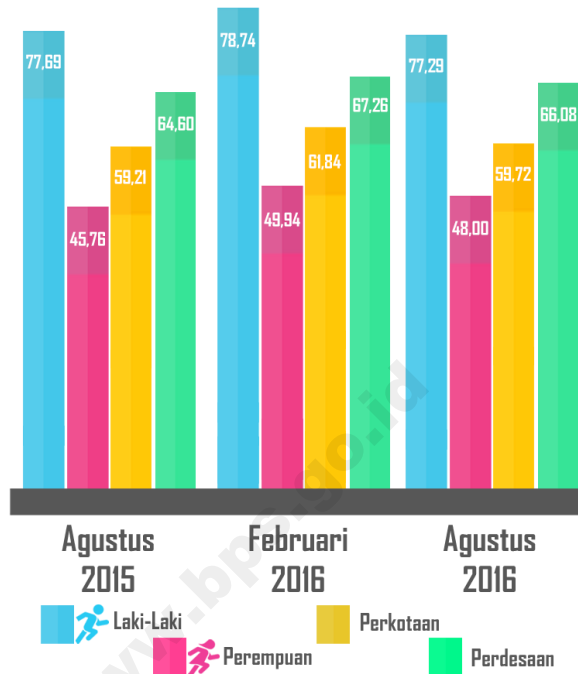
Grafik 5. *Employment to Population Ratio, 2015-2016*

“Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk pada Agustus 2016 adalah sebesar 62,62”

Salah satu indikator penting dalam pasar kerja adalah EPR, secara nasional angka EPR pada Agustus 2016 adalah sebesar 62,62. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada Agustus 2016 dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 63 orang yang bekerja. EPR ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 yaitu naik sebesar 0,92 poin, dan mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan Februari 2016 yaitu turun sebesar 1,69 poin.

Grafik 6.
Employment to Population Ratio
Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016

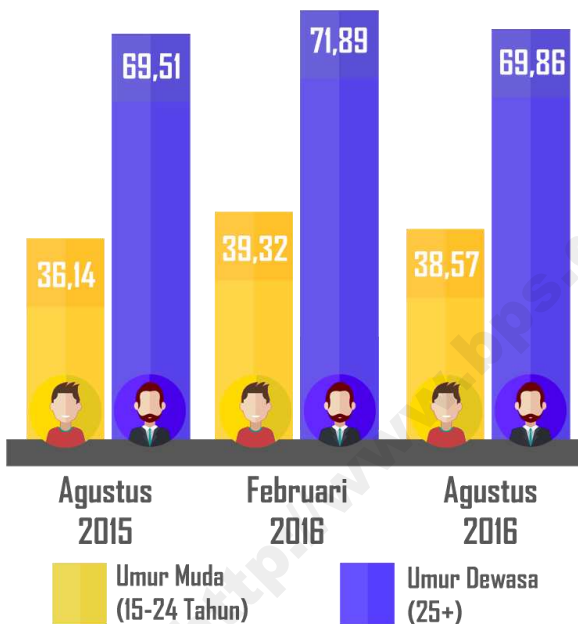


“EPR laki-laki lebih tinggi dari EPR perempuan dan EPR di perdesaan lebih tinggi dari EPR di perkotaan”

Pada periode Agustus 2015, Februari 2016, dan Agustus 2016 jika dilihat berdasarkan jenis kelamin EPR laki-laki lebih tinggi sekitar 1,5 kali dibandingkan dengan EPR perempuan. Sebagai contoh pada Agustus 2016, EPR laki-laki pada periode ini adalah sebesar 77,29 sedangkan EPR perempuan hanya sebesar 48,00. Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2016 EPR daerah perkotaan (59,72) lebih rendah dibandingkan dengan EPR daerah perdesaan (66,08). Begitu pula untuk periode Agustus 2015

dan Februari 2016, dimana wilayah perkotaan EPR-nya selalu lebih rendah sekitar 5 sampai dengan 6 poin dibandingkan dengan EPR wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perdesaan sedikit lebih mampu dalam menciptakan pekerjaan, terlepas pekerjaan tersebut layak atau tidak.

Grafik 7. *Employment to Population Ratio Menurut Kelompok Umur, 2015-2016*



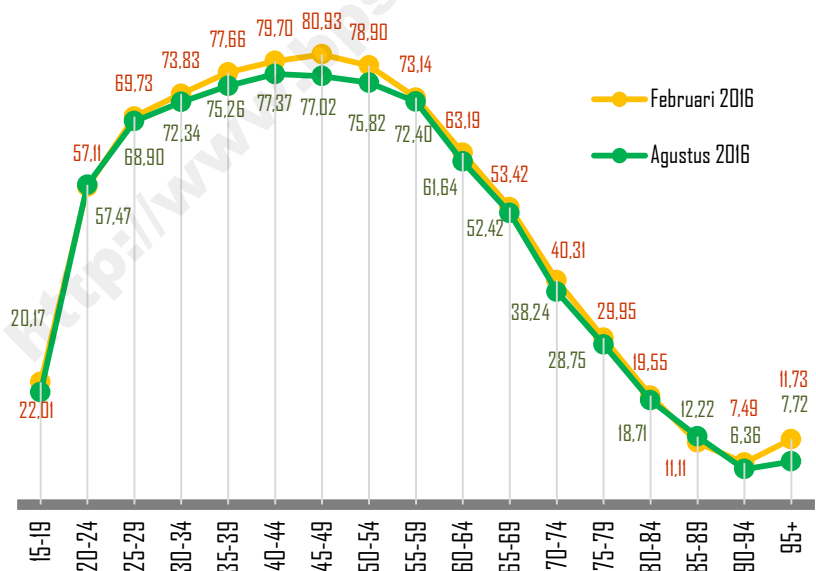
“EPR kelompok umur muda lebih rendah dari EPR kelompok umur dewasa”

Pada Grafik 7 memperlihatkan bahwa EPR penduduk kelompok umur muda selalu lebih rendah daripada penduduk kelompok umur dewasa baik pada Agustus 2015, Februari 2016, maupun Agustus 2016. EPR penduduk kelompok umur muda lebih rendah sekitar 31 sampai dengan 33 persen dari penduduk kelompok umur dewasa. EPR penduduk kelompok

umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada periode Februari 2016-Agustus 2016 turun sebesar 0,75 poin dari 39,32. Berbeda dengan periode Agustus 2015-Agustus 2016, dimana EPR penduduk kelompok umur muda naik sebesar 2,43 poin. Sama dengan pola EPR kelompok muda, EPR untuk penduduk kelompok umur dewasa (umur 25 tahun ke atas), pada periode Februari 2016-Agustus 2016 turun sebesar 2,03 poin, sedangkan periode Agustus 2015-Agustus 2016 EPR naik sebesar 0,35 poin.

“EPR tertinggi pada kelompok umur 40-44 tahun”

Grafik 8. *Employment to Population Ratio Menurut Kelompok Umur, Februari 2016 dan Agustus 2016*



Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 8 mirip dengan pola TPAK pada Grafik 3. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari Grafik 8 terlihat bahwa

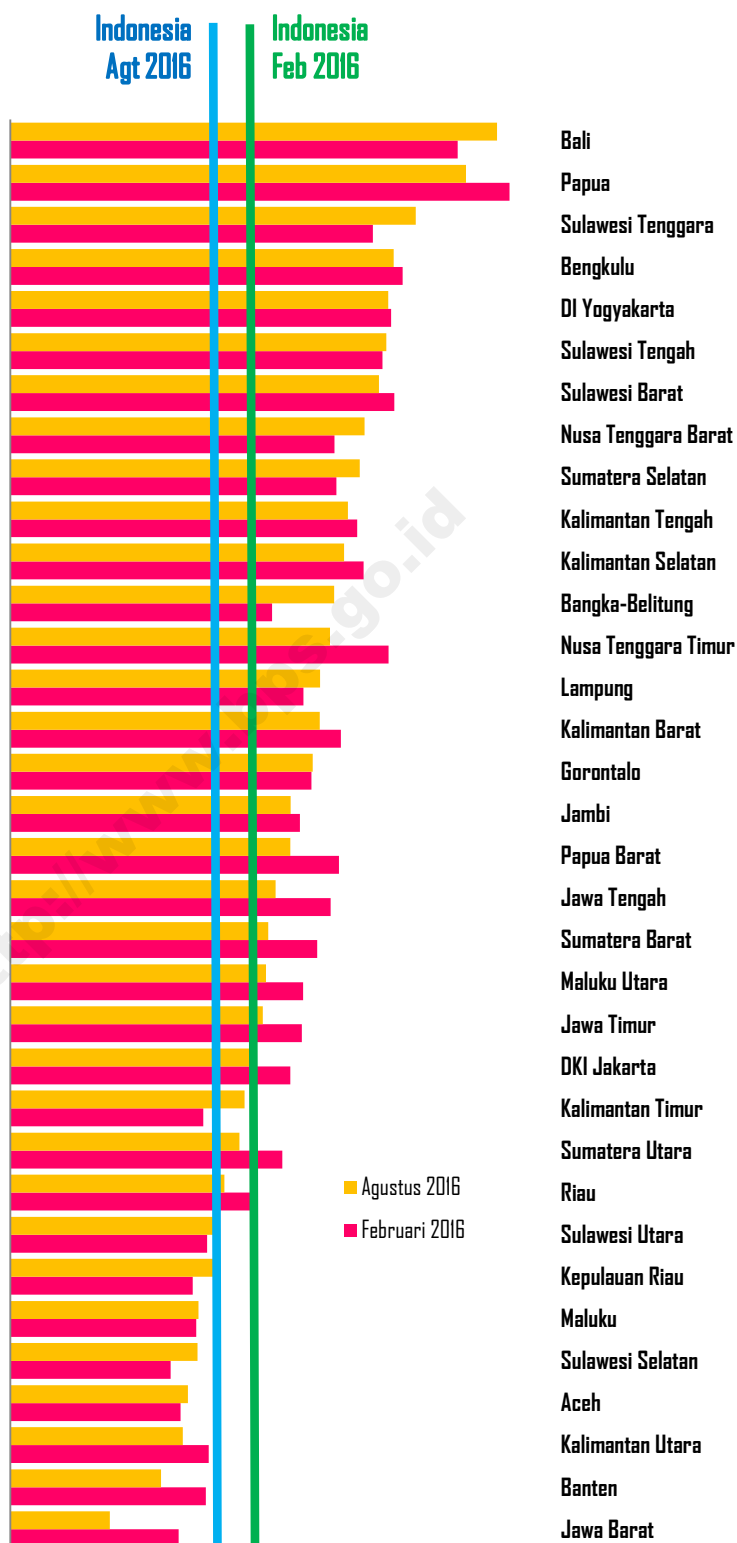
puncak EPR untuk keadaan Agustus 2016 ini berada pada kelompok umur 40-44 tahun dengan EPR 77,37. Grafik EPR periode Februari 2016 dan Agustus 2016 terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur, dengan nilai EPR Agustus 2016 yang lebih rendah pada hampir semua kelompok umur kecuali kelompok umur 20-24 tahun dan 85-89 tahun.

“Agustus 2016: EPR tertinggi di Provinsi Bali, Papua, dan Sulawesi Tenggara”

Grafik 9 dan Lampiran 9 menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Agustus 2016, yaitu Provinsi Bali (75,78), Provinsi Papua (74,13) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (71,47). Angka EPR ketiga provinsi tersebut lebih tinggi daripada angka EPR nasional sebesar 62,62 persen. Sedangkan pada Februari 2016 provinsi dengan EPR tertinggi diduduki oleh Provinsi Papua (76,43), Provinsi Bali (73,69) dan Provinsi Bengkulu (70,77).

Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode Agustus 2016 adalah Provinsi Jawa Barat (55,26), Provinsi Banten (57,98), dan Provinsi Kalimantan Utara (59,14). Sedangkan pada keadaan Februari 2016 posisi ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (58,49), Provinsi Jawa Barat (58,91), dan Provinsi Aceh (59,01).

Grafik 9. *Employment to Population Ratio* Menurut Provinsi, Februari 2016 dan Agustus 2016



KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

“Mayoritas pekerja di Indonesia berstatus berusaha”

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015–2016

Status Pekerjaan Utama (1)	2015	2016	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	38,70	38,38	38,70
Berusaha	47,31	47,79	47,56
Pengusaha	3,54	3,34	3,70
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	32,85	34,31	33,33
Pekerja bebas	10,92	10,14	10,53
Pekerja keluarga	13,99	13,83	13,74
Total	100,00	100,00	100,00

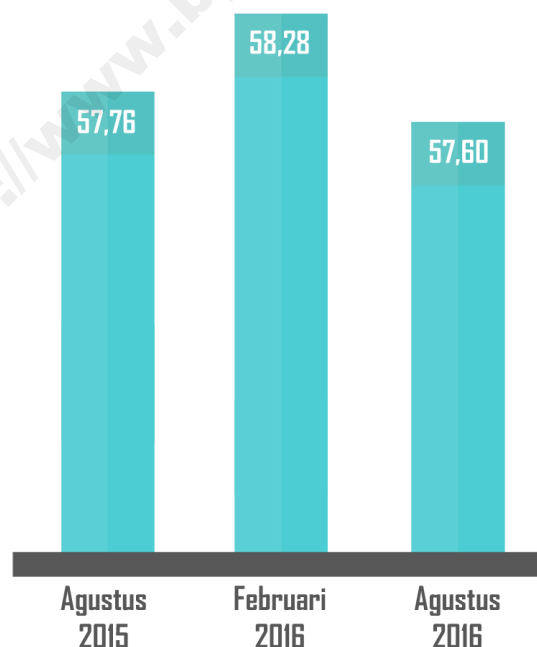
Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2016 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode Agustus 2015 dan Februari 2016. Berdasarkan Tabel 1, persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (47,56 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (38,70 persen),

dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (13,74 persen) pada Agustus 2016.

Periode Februari 2016-Agustus 2016 penduduk bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen poin, sedangkan penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga juga mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin.

“Pada Agustus 2016, terjadi penurunan persentase pekerja rentan jika dibandingkan Februari 2016 maupun Agustus 2015”

Grafik 10. Persentase Pekerja Rentan, 2015-2016

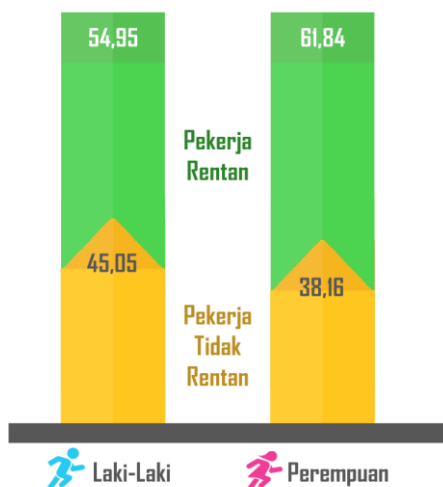


Jika dibandingkan dengan periode setahun yang lalu (Agustus 2015), persentase penduduk bekerja dengan status

berusaha mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen poin. Sedangkan persentase pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin dan persentase penduduk bekerja dengan upah/gaji tidak mengalami perubahan atau tetap dengan angka 38,70 persen.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment* mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Pada Agustus 2016 pekerja rentan mencapai 57,60 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 58 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015, maupun Februari 2016 persentase pekerja rentan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,16 persen poin dan 0,68 persen poin.

“Sebagian besar perempuan masuk kategori pekerja rentan”



Grafik II. Persentase Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2016

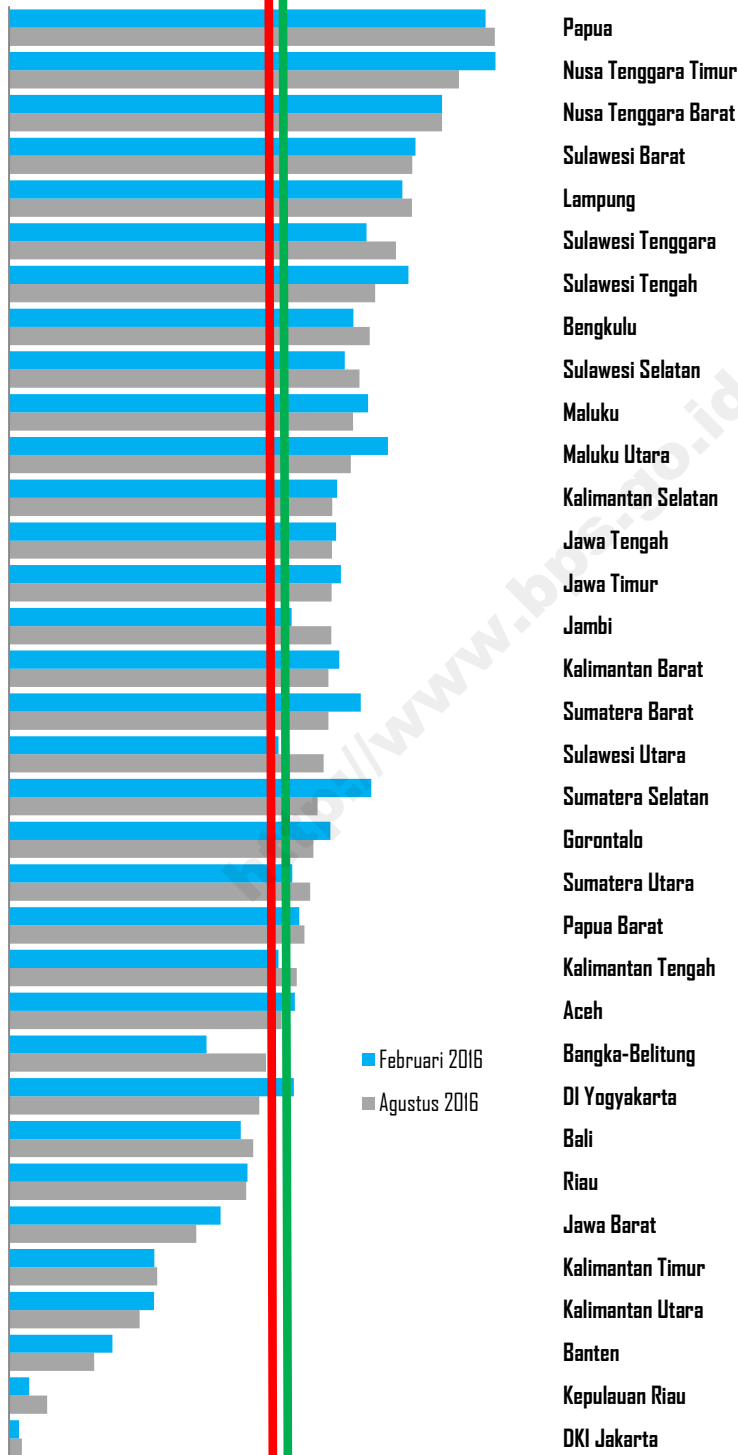
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, proporsi pekerja rentan pada perempuan sebesar 61,84 persen, yang berarti hampir dua per tiga pekerja perempuan masuk kategori rentan. Sementara pada laki-laki, proporsi pekerja rentan sebesar 54,95 persen.

“Agustus 2016: Papua merupakan provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi”

Tiga provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Agustus 2016, yaitu Provinsi Papua (78,37), Provinsi Nusa Tenggara Timur (74,80), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (73,11). Persentase pekerja rentan ketiga provinsi tersebut lebih tinggi dari angka pekerja rentan secara nasional sebesar 57,60 persen. Sedangkan pada Februari 2016, tiga provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (78,42), Provinsi Papua (77,43), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (73,11). Sebaliknya provinsi dengan persentase pekerja rentan terendah pada Agustus 2016 diduduki oleh Provinsi DKI (31,29), Provinsi Kepulauan Riau (33,80), dan Provinsi Banten (38,49). Posisi provinsi dengan persentase pekerja rentan terendah ini, masih tetap sama jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 (Grafik 12 dan Lampiran 10).

Indonesia
Agt 2016

Indonesia
Feb 2016



Grafik 12. Persentase Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari 2016 dan Agustus 2016

KILM 4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

“Mayoritas penduduk bekerja di sektor jasa-jasa”

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia pada Agustus 2016 masih mempunyai pola yang sama dengan keadaan Agustus 2015 maupun Februari 2016, yaitu didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 46,69 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 31,90 persen, dan sektor manufaktur sebesar 21,41 persen.

Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015–2016

Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	32,88	31,74	31,90
Manufaktur	21,84	21,05	21,41
Pertambangan	1,15	1,09	1,25
Industri	13,29	13,24	13,12
Listrik, Gas dan Air	0,25	0,33	0,30
Bangunan	7,15	6,39	6,74
Jasa-jasa	45,28	47,21	46,69
Perdagangan	22,37	23,62	22,54
Transportasi	4,45	4,30	4,74
Keuangan	2,84	2,89	2,98
Jasa Kemasyarakatan	15,62	16,40	16,43
Total	100,00	100,00	100,00

Apabila dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan (22,54 persen) dan sektor jasa kemasyarakatan (16,43 persen). Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri (13,12 persen) dan sektor bangunan (6,74 persen).

Jika dilihat pada periode Februari 2016-Agustus 2016, sektor jasa-jasa mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin. Sementara itu sektor pertanian dan sektor manufaktur mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 persen poin dan 0,36 persen poin.

Pada periode Sakernas Agustus 2015-Agustus 2016, sektor jasa-jasa mengalami peningkatan sebesar 1,41 persen poin, sedangkan sektor pertanian dan manufaktur mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,98 persen poin dan 0,43 persen poin.

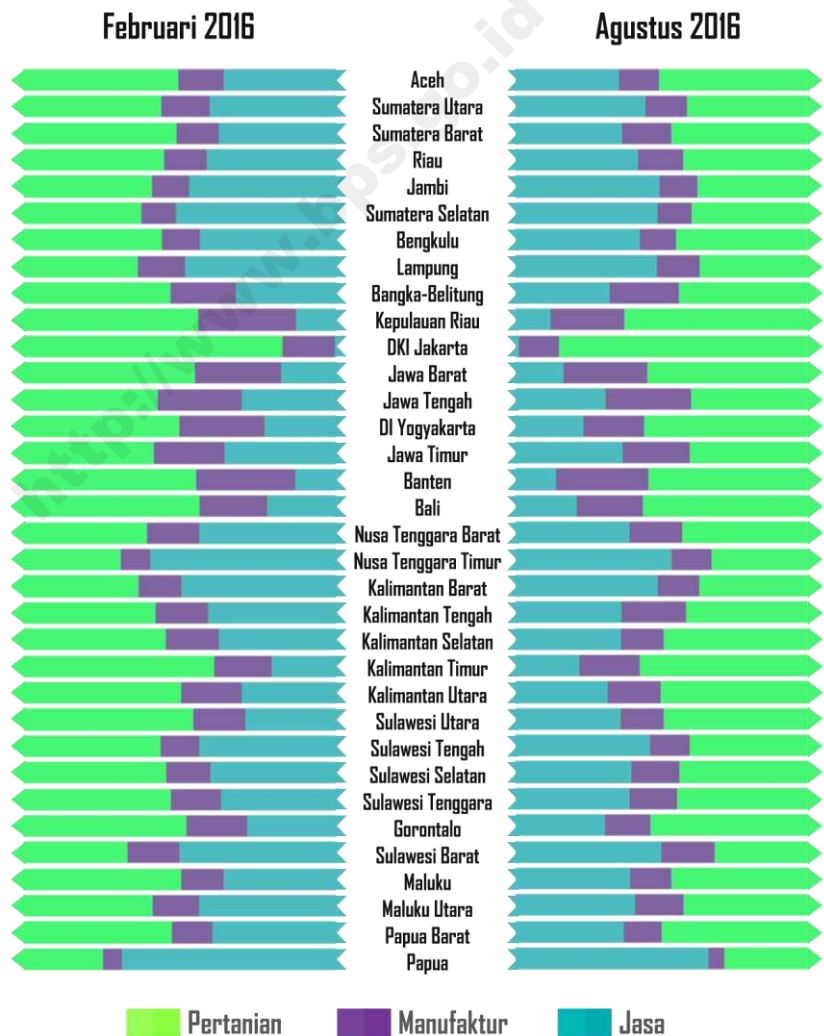
“Pada Februari 2016 dan Agustus 2016 provinsi dengan persentase tertinggi yang penduduknya bekerja di sektor pertanian adalah Papua”

Komposisi sektoral Sakernas Agustus 2016 menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor pertanian adalah Provinsi Papua (68,83 persen), provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Provinsi Banten (31,56 persen) dan provinsi dengan persentase tertinggi

penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Provinsi DKI Jakarta (85,18 persen).

Kondisi ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 dimana pada sektor pertanian Provinsi Papua masih mendominasi yaitu 68,58 persen, sektor manufaktur oleh Provinsi Banten sebesar 31,96 persen, dan sektor jasa-jasa oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 82,87 persen, lihat Grafik 13 dan Lampiran 11.

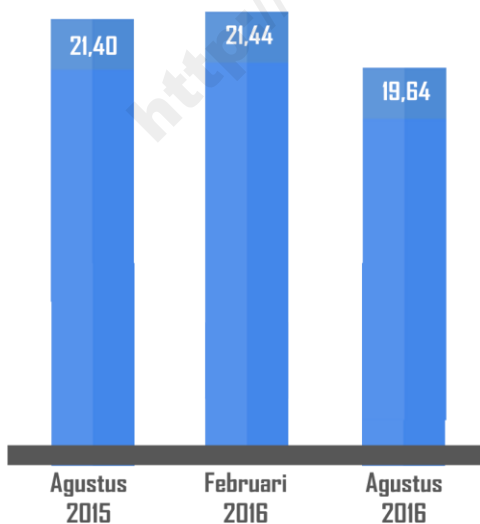
Grafik 13. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2016 dan Agustus 2016



KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

“Agustus 2016: Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 19,64 persen”



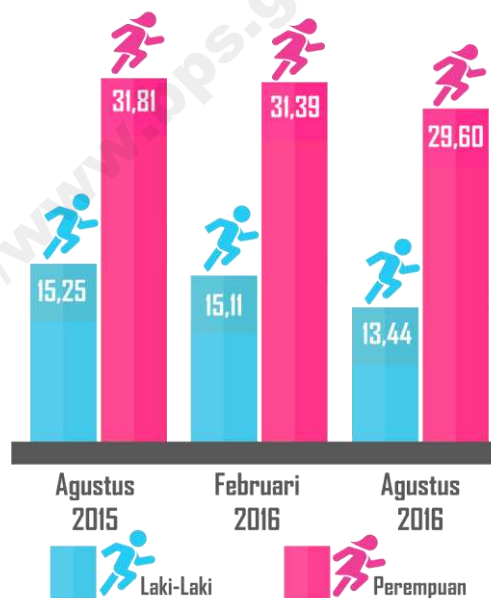
Grafik 14. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2015-2016

Hasil Sakernas Agustus 2016, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 19,64 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa

dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 20 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak punya keinginan untuk menambah pekerjaan (jam kerja). Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Agustus 2015 maupun Februari 2016 dengan penurunan masing-masing sebesar 1,76 persen poin dan 1,80 persen poin.

“Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dari pada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki”

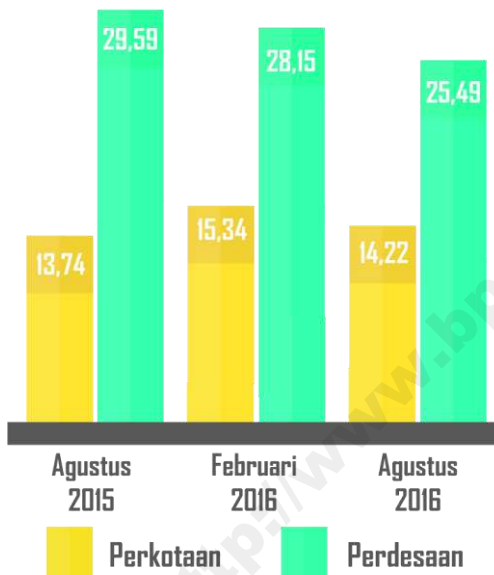
Grafik 15. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2016



Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 29,60 persen dan 13,44 persen.

Tingkat pekerja paruh waktu perempuan mengalami penurunan bila dibandingkan pada keadaan Agustus 2015 dan Februari 2016 masing-masing turun sebesar 2,21 persen poin dan 1,79 persen poin.

“Tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan mengalami



Grafik 16. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2015-2016

penurunan, sementara di perkotaan terjadi naik-turun”

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan pada Agustus 2016 sebesar 14,22 persen sementara di perdesaan mencapai 25,49 persen. Tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,48 persen poin apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015, namun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 yaitu menurun sebesar 1,12 persen poin. Sedangkan di perdesaan

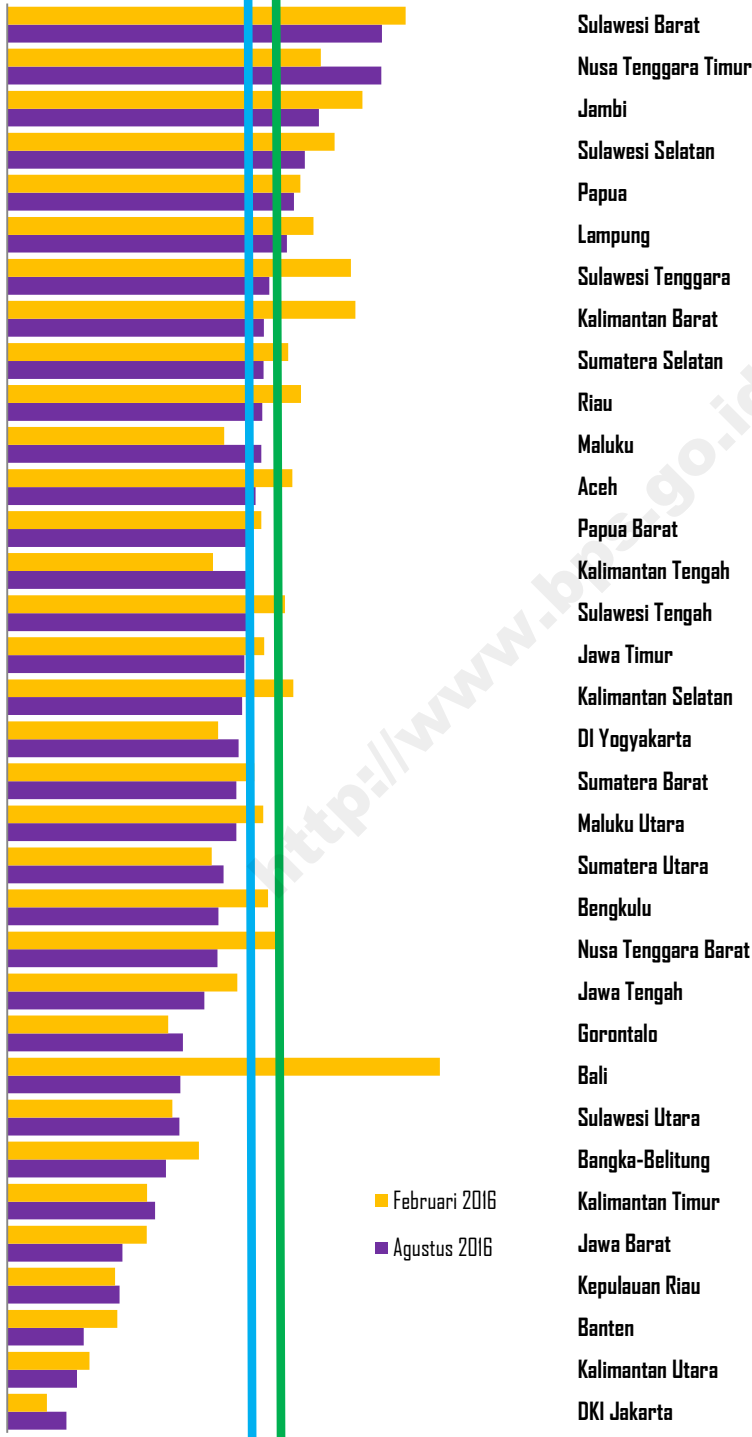
mengalami penurunan bila dibandingkan Agustus 2015 maupun Februari 2016 dengan penurunan masing-masing sebesar 4,10 persen poin dan 2,66 persen poin.

“Agustus 2016: provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat pekerja paruh waktu tertinggi”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 (Grafik 17; Lampiran 12), tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (32,33 persen), posisi kedua diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (32,27 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jambi (27,72 persen). Persentase pekerja paruh waktu ketiga provinsi tersebut lebih tinggi dari angka pekerja paruh waktu secara nasional sebesar 19,64 persen. Sedangkan pada Februari 2016, tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Bali (36,54 persen), Provinsi Sulawesi Barat (34,05 persen), dan Provinsi Jambi (30,90 persen). Kedudukan tiga provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada Agustus 2016 adalah Provinsi DKI Jakarta (9,32 persen), Kalimantan Utara (10,10 persen), dan Provinsi Banten (10,57 persen). Sedangkan pada Februari 2016, tingkat pekerja paruh waktu dengan peringkat terendah diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (7,90 persen), Kalimantan Utara (11,00 persen), dan Kepulauan Riau (12,86 persen).

Indonesia
Agt 2016

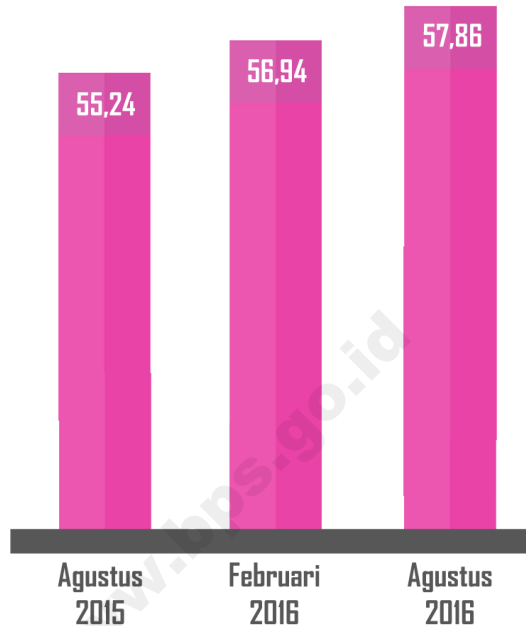
Indonesia
Feb 2016



Grafik 17. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016

“Agustus 2016, share perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 57,86 persen”

Grafik 18. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2015-2016



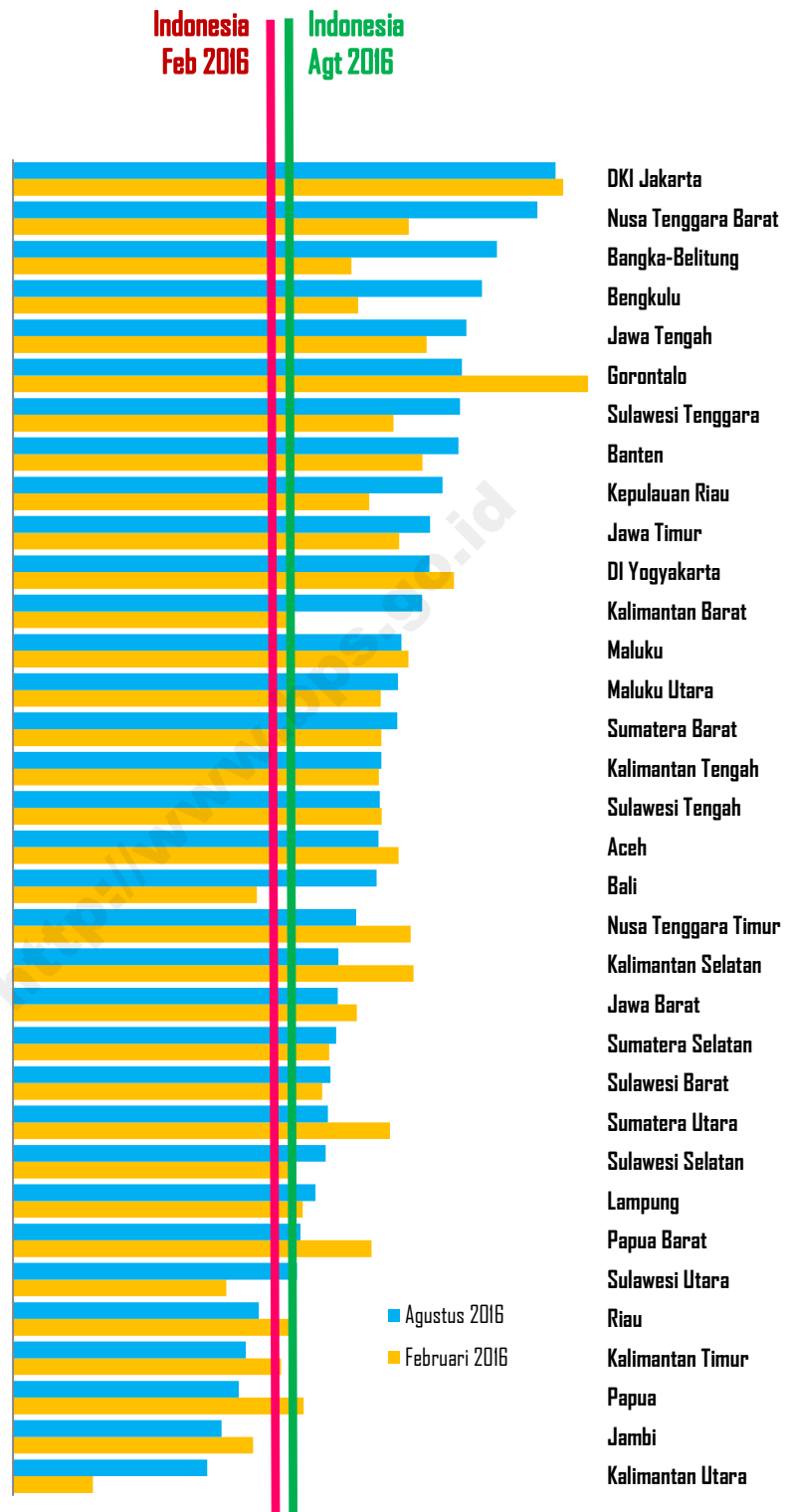
Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 sebesar 57,86 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 58 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu Agustus 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 maupun Februari 2016 dengan masing-masing kenaikan sebesar 2,62 persen poin dan 0,92 persen poin.

“Agustus 2016: DKI Jakarta adalah provinsi dengan share perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi”

Grafik 19 dan Lampiran 12 menunjukkan *share* perempuan terhadap pekerja paruh waktu menurut provinsi. Dari grafik tersebut terlihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi pada Agustus 2016 terdapat di Provinsi DKI Jakarta (68,15 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (67,05 persen), dan Provinsi Bangka-Belitung (64,57 persen). Sementara pada periode Februari 2016 peringkat ini diduduki oleh Provinsi Gorontalo (70,33 persen), Provinsi DKI Jakarta (68,62 persen), dan Provinsi DI Yogyakarta (61,94 persen).

Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan terhadap pekerja paruh waktu terendah berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 secara berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Utara (46,86 persen), Provinsi Jambi (47,75 persen), dan Provinsi Papua (48,79 persen). Sementara pada Februari 2016 posisi ini diduduki secara berturut-turut oleh Provinsi Kalimantan Utara (39,87 persen), Provinsi Sulawesi Utara (48,03 persen), dan Provinsi Jambi (49,67 persen).

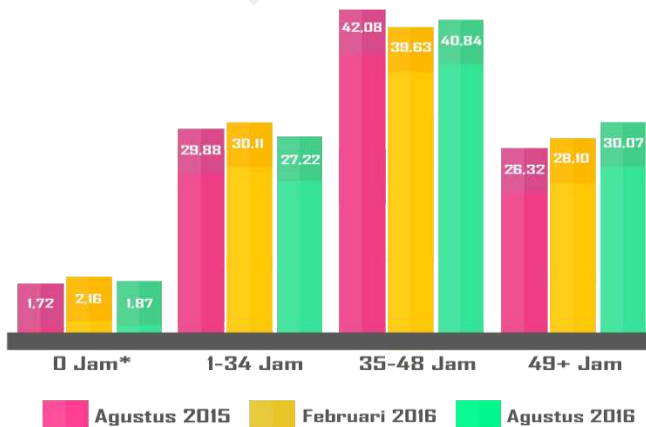
Grafik 19. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016



KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di atas 35 jam per minggu mencapai hampir lebih dari dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 29,09 persen, persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2016 (32,27 persen) maupun Agustus 2015 (31,60 persen) berturut-turut sebesar 3,18 persen poin dan 2,51 persen poin. Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja pada Agustus 2016 terdapat pada kelompok 40–48 jam per minggu yang mencapai 31,38 persen. Selain itu masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 30,07 persen (lihat Lampiran 13).

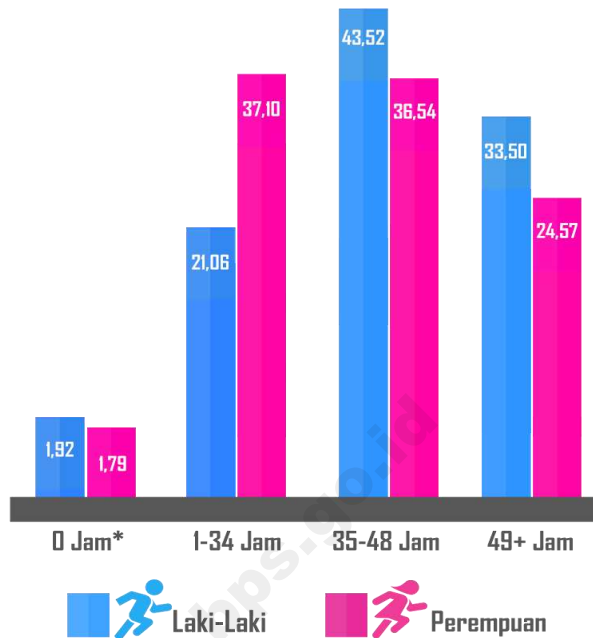
“Mayoritas penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu”



Grafik 20. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2015-2016

“Penduduk perempuan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu daripada laki-laki”

Grafik 21. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2016

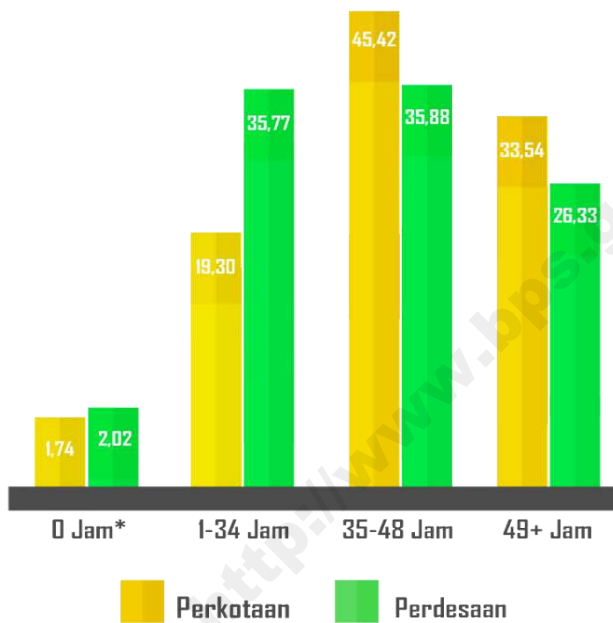


Dapat dicermati pula pada Grafik 21, pada Agustus 2016 secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai 38,89 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 22,98 persen.

Sedangkan untuk jam kerja di atas 48 jam per minggu persentase laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sakernas Agustus 2016 menunjukkan persentase penduduk

perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 24,57 persen, sementara persentase penduduk laki-laki mencapai 33,50 persen.

“Penduduk perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibandingkan dengan penduduk perkotaan”



Grafik 22. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2016

Apabila diamati lebih lanjut, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di

daerah perdesaan mencapai 37,79 persen sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 21,04 persen.

“Pada Agustus 2016, provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 seperti yang terlihat pada Grafik 23 dan Lampiran 14, menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (46,54 persen), Provinsi Sulawesi Barat (44,84 persen), dan Provinsi Papua (39,78 persen). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (12,24 persen), Provinsi Kalimantan Utara (17,05 persen), dan Kepulauan Riau (17,17 persen).



Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Barat
Papua
Jambi
Maluku
Papua Barat
Riau
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Nusa Tenggara Barat
Aceh
Sulawesi Tengah
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Lampung
Sumatera Utara
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Bengkulu
Maluku Utara
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Gorontalo
Sulawesi Utara
Jawa Tengah
Bangka-Belitung
Kalimantan Timur
Bali
Jawa Barat
Banten
Kepulauan Riau
Kalimantan Utara
DKI Jakarta

Grafik 23. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2016



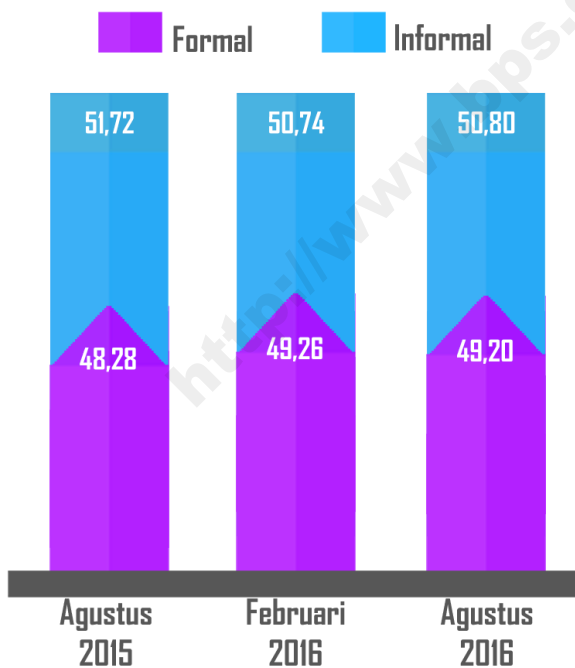
KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

“Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di sektor informal yaitu 50,80 persen”

Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa dari 118,41 juta orang yang bekerja, sebanyak 50,80 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (60,15 juta orang). Pada periode Agustus 2015, Februari 2016, dan Agustus 2016 tampak adanya fluktuasi persentase penduduk

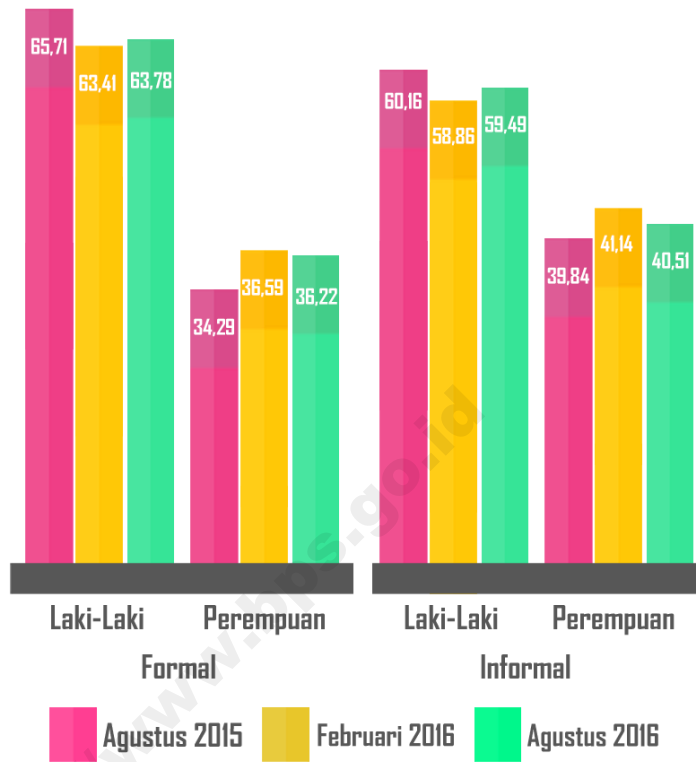
bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2015 sebesar 51,72 persen, turun menjadi 50,74 persen pada Februari 2016, dan kembali naik pada Agustus 2016 menjadi 50,80 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Agustus 2015 mencapai 48,28 persen, naik menjadi 49,26 persen pada Februari 2016, dan kembali turun pada Agustus 2016 menjadi 49,20 persen.



Grafik 24. Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal, 2015-2016

“Sektor formal masih didominasi laki-laki”

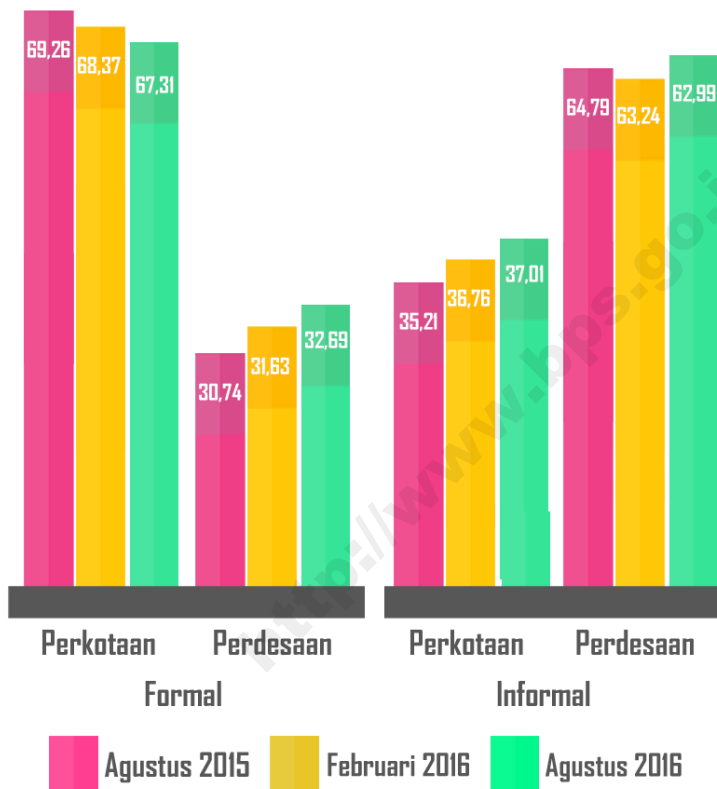
Grafik 25. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2015-2016



Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yang mencapai 63,78 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Agustus 2015 dan Februari 2016 masing-masing mencapai 65,71 persen dan 63,41 persen. Sementara pada sektor informal kaum laki-laki juga mendominasi tetapi dengan perbedaan yang tidak terlalu besar. Pada Agustus 2016 persentase penduduk informal yang

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 59,49 persen sedangkan perempuan sebesar 40,51 persen.

“Pekerja di sektor informal lebih banyak tinggal di daerah pedesaan”



Grafik 26. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016

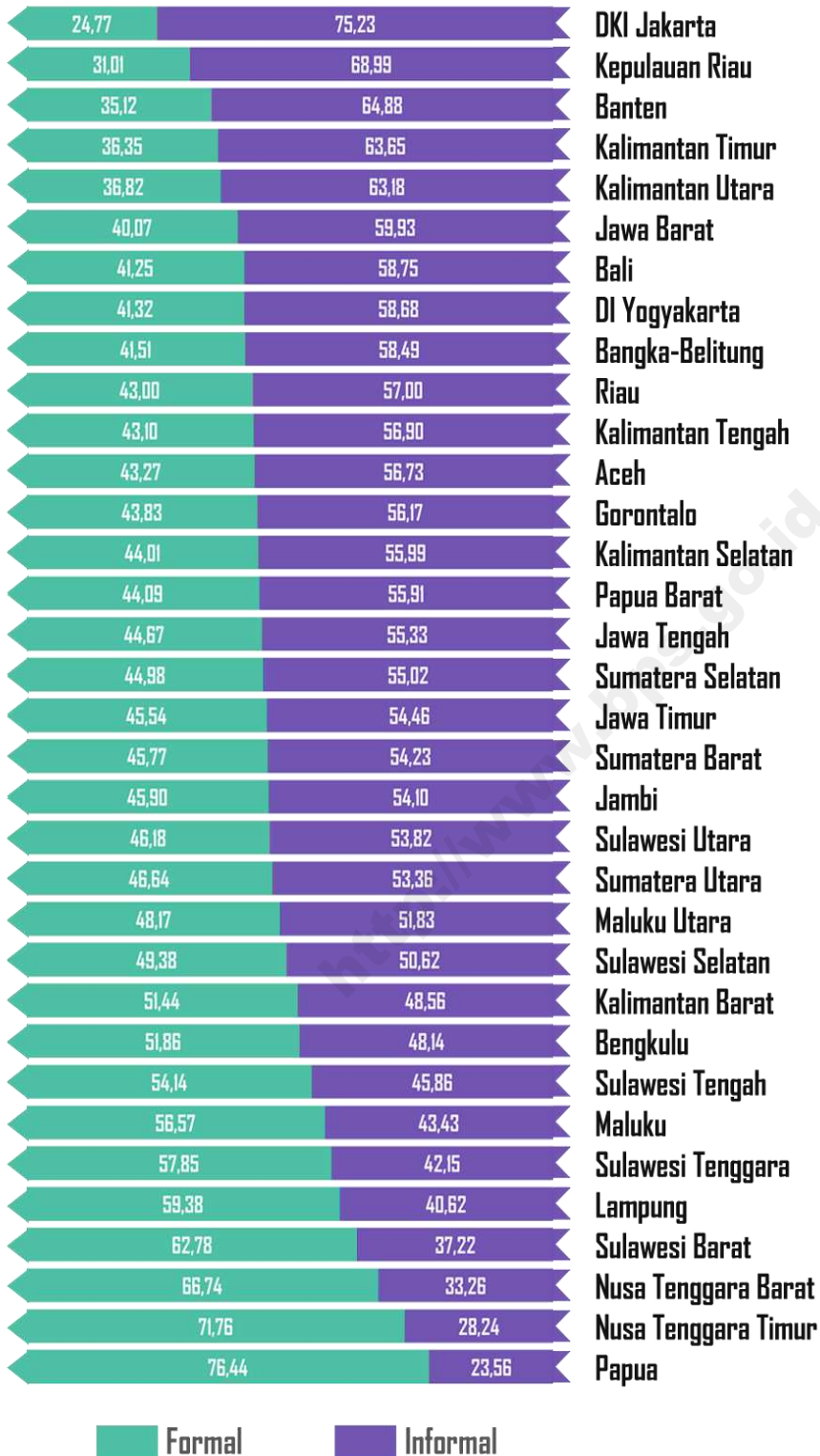
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 seperti yang tampak pada Grafik 26 menunjukkan bahwa penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 67,31 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 dan Februari 2016, masing-

masing menurun sebesar 1,95 persen poin dan 1,06 persen poin. Di sisi lain, persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih didominasi oleh daerah perdesaan, bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 dan Februari 2016 menurun masing-masing sebesar 1,80 persen poin dan 0,25 persen poin.

“Pada Agustus 2016, Papua merupakan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor informal”

Apabila ditinjau berdasarkan perbedaan wilayah per provinsi, ternyata provinsi yang mendominasi sektor formal lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 27 dan Lampiran 15). Lima peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, tiga diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (76,44 persen), Provinsi Kepulauan Riau (71,76 persen), dan Banten (66,74 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (62,78 persen) dan Kalimantan Utara (59,38 persen). Di sisi lain, lima provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (75,23 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (68,99 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (64,88 persen), Provinsi Sulawesi Barat (63,65 persen), dan Provinsi Lampung (63,18 persen).

Grafik 27. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal dan Provinsi, Agustus 2016



BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN

KILM 8. Pengangguran

“Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia sebesar 5,61 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 seperti yang tampak pada Tabel 3, TPT mencapai 5,61 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 sebesar 0,57 persen poin, namun bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen poin.

Seiring fluktuasi yang terjadi pada TPT secara nasional baik bila dibandingkan dengan Sakernas Agustus 2015 maupun Februari 2016, TPT berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan adanya fluktuasi. Sebagai gambaran, TPT perempuan pada periode Agustus 2016 dibandingkan dengan Agustus 2015 mengalami penurunan sebesar 0,92 persen poin, sedangkan bila dibandingkan dengan Februari 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen poin. Begitu pula terjadi pada kelompok laki-laki yang mengalami penurunan sebesar 0,37 bila dibandingkan dengan Agustus 2015 dan mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen poin bila

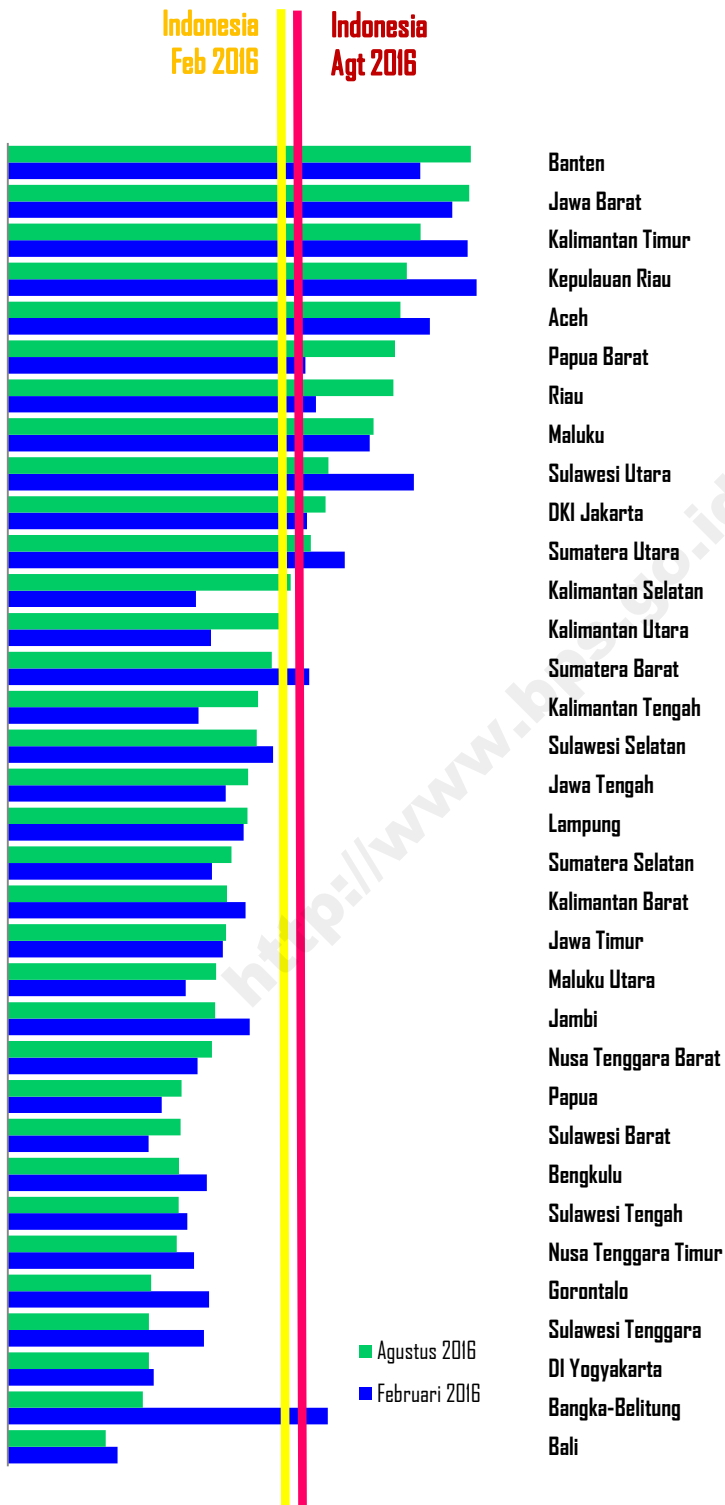
dibandingkan dengan Februari 2016. Sementara berdasarkan perbedaan wilayah tempat tinggal pada periode yang sama, TPT di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang sama. TPT di daerah perkotaan turun sebesar 0,71 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2015 dan naik sebesar 0,07 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2016. Sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 0,42 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2015 dan naik sebesar 0,16 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2016.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2015–2016

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	
Laki-laki	6,07	5,66	5,70	
Perempuan	6,37	5,26	5,45	
Perkotaan	7,31	6,53	6,60	
Perdesaan	4,93	4,35	4,51	
Total	6,18	5,50	5,61	

“Agustus 2016: TPT tertinggi ada di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur”

Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa TPT tertinggi menurut provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Banten (8,92 persen), Provinsi Jawa Barat (8,89 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (7,95 persen). Sementara pada Februari 2016 TPT tertinggi menurut provinsi diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau (9,03 persen), Provinsi Kalimantan Timur (8,86 persen), dan Provinsi Jawa Barat (8,57 persen). Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah pada Agustus 2016 diduduki oleh Provinsi Bali (1,89 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Bangka-Belitung (2,60 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi DI Yogyakarta (2,72 persen). Pada periode Februari 2016 posisi ini diduduki oleh Provinsi Bali (2,12 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (2,72 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi DI Yogyakarta (2,81 persen). Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 28 dan Lampiran 16.



Grafik 28. TPT Menurut Provinsi (persen), Februari 2016 dan Agustus 2016

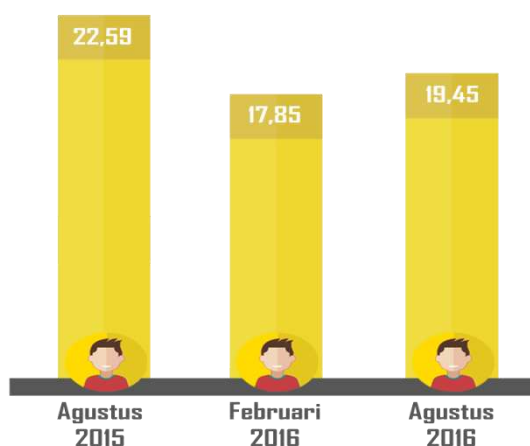
KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran kaum muda;
2. Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
3. *Share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur; dan
4. Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

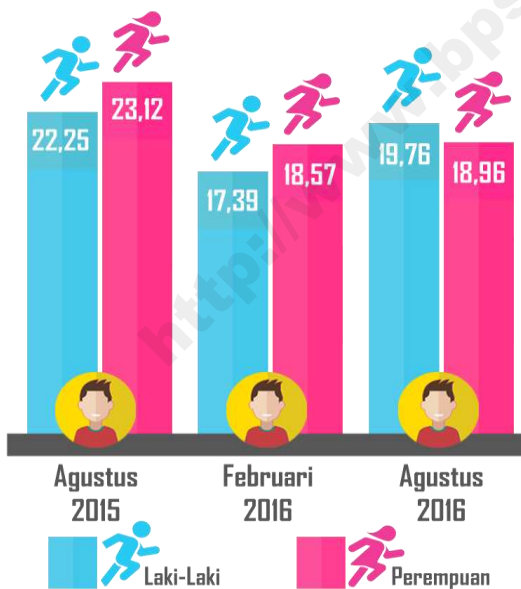
"TPT kelompok umur muda masih cukup tinggi"

**Grafik 29. TPT
Penduduk Umur Muda
(persen), 2015-2016**



Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 19,45 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 19 orang yang menganggur. Angka tersebut menurun sebesar 3,14 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2015 dan meningkat sebesar 1,60 persen poin apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 (Grafik 29).

“Agustus 2016: TPT kelompok umur muda lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan”



Grafik 30. TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2016

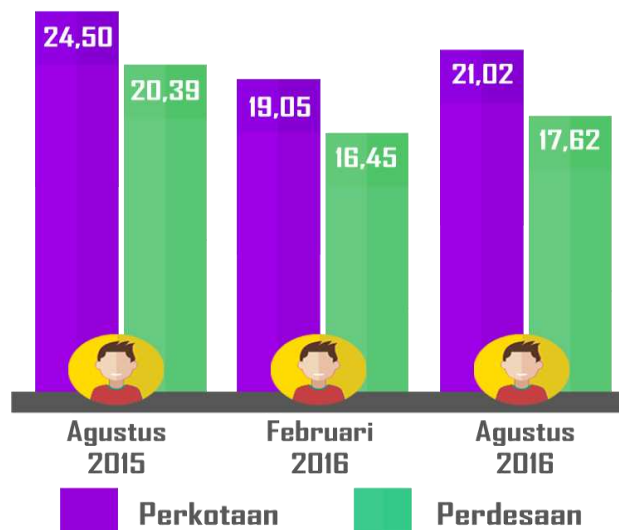
Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada periode Agustus 2015 dan Februari 2016, TPT penduduk umur muda pada perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Sesuai pula dengan TPAK laki-laki yang lebih tinggi daripada

perempuan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perempuan umur 15–24 tahun lebih banyak yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja daripada laki-laki di umur yang sama. Akan tetapi, pada Agustus 2016 TPT penduduk umur muda laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada Agustus 2016 mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016. Peningkatan TPT tersebut lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan. TPT umur muda laki-laki mengalami peningkatan sebesar 2,37 persen poin, sedangkan perempuan hanya sebesar 0,39 persen poin.

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan”

**Grafik 31. TPT
Penduduk Umur Muda
Menurut Daerah Tempat
Tinggal (persen),
2015-2016**



Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan bahwa pola TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada Agustus 2016, TPT daerah perkotaan mencapai 21,02 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 17,62 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 21 orang yang menganggur, sementara untuk daerah perdesaan sekitar 18 orang.

“TPT kelompok umur muda hampir tujuh kali lipat lebih tinggi daripada TPT dewasa”

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Agustus 2016 sebesar 6,87 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda hampir tujuh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa mengalami peningkatan sebesar 1,08 poin dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, sementara jika dibandingkan dengan Agustus 2015 rasio tersebut menurun sebesar 0,91 poin. Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, pada periode Agustus 2016, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini sama dengan keadaan Februari 2016 dan Agustus 2015. Menurut kategori kota-desa, rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa

cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan baik pada Agustus 2016, Februari 2016, maupun Agustus 2015. Sebagai contoh, pada Agustus 2016 rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa di daerah perkotaan sebesar 5,80 sementara di daerah perdesaan mencapai 8,99.

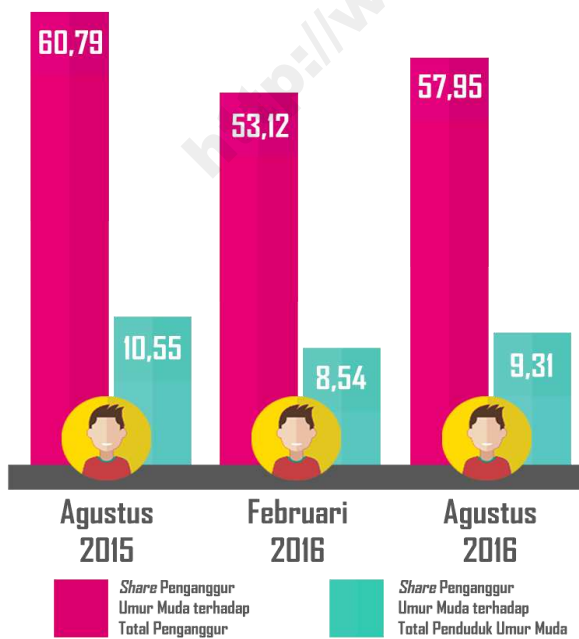
Tabel 4. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2015–2016

Indikator	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	7,51	5,15	6,73
Perempuan	8,24	7,07	7,13
Perkotaan	6,48	4,74	5,80
Perdesaan	10,41	8,05	8,99
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	7,78	5,79	6,87

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 cukup tinggi yaitu 57,95 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2016, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 58 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun. Seperti yang terlihat pada Grafik 32, angka ini mengalami peningkatan sebesar 4,83 persen poin bila

dibandingkan dengan Februari 2016. Namun jika dibandingkan dengan Agustus 2015 mengalami penurunan sebesar 2,84 persen poin. Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2016 sebesar 9,31 persen, hal ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2016 dari 100 penduduk berumur 15-24 tahun sekitar 9 orang diantaranya merupakan penganggur muda. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka Februari 2016 (8,54 persen), namun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan angka Agustus 2015 (10,55 persen).

“Agustus 2016: share penganggur umur muda terhadap total penganggur 57,95 persen sementara share penganggur terhadap total penduduk umur muda 9,31 persen”



Grafik 32. *Share* Penganggur Umur Muda (persen), 2015-2016

KILM II. Pengangguran dan Pendidikan

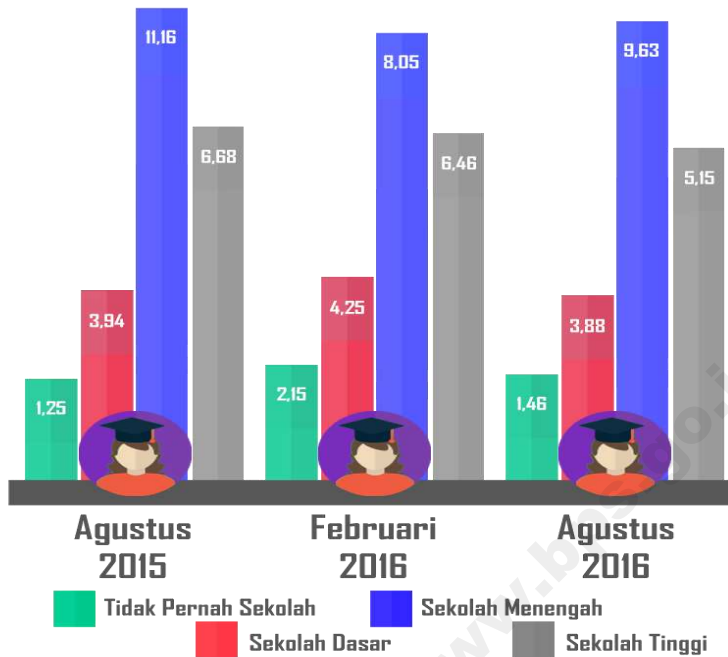
Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, apabila *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

“TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada Sekolah Menengah”

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 9,63 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,46 persen.

“Dibandingkan dengan kondisi Februari 2016 terjadi peningkatan TPT hanya pada pendidikan Sekolah Menengah”

Grafik 33. TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015-2016



Sejalan dengan TPT nasional yang cenderung mengalami penurunan selama periode Februari 2016-Agustus 2016, hampir semua tingkat pendidikan mengalami penurunan, peningkatan TPT menurut pendidikan hanya terjadi pada pendidikan sekolah menengah naik sebesar 1,58 persen poin. Penurunan TPT terjadi pada mereka yang tidak pernah sekolah, pendidikan dasar, dan sekolah tinggi yaitu masing-masing turun sebesar 0,69 persen poin, 0,37 persen poin, dan 1,31 persen poin.

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015-2016

Tingkat Pendidikan	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,25	2,15	1,46
Laki-laki	1,67	1,94	1,10
Perempuan	0,93	2,28	1,71
Perkotaan	2,46	2,74	2,84
Perdesaan	0,86	1,94	1,03
Sekolah Dasar	3,94	4,25	3,88
Laki-laki	4,09	4,71	4,09
Perempuan	3,68	3,51	3,52
Perkotaan	4,74	5,48	4,81
Perdesaan	3,38	3,35	3,20
Sekolah Menengah	11,16	8,05	9,63
Laki-laki	10,14	7,66	9,24
Perempuan	13,31	8,86	10,42
Perkotaan	10,98	8,04	9,64
Perdesaan	11,56	8,08	9,61
Sekolah Tinggi	6,68	6,46	5,15
Laki-laki	6,14	5,70	4,78
Perempuan	7,30	7,26	5,54
Perkotaan	6,46	6,48	5,19
Perdesaan	7,46	6,38	5,00
Total	6,18	5,50	5,61

Berdasarkan jenis kelamin, pada tingkat pendidikan sekolah menengah peningkatan TPT periode Agustus 2016 dibandingkan dengan Februari 2016 terjadi baik pada laki-laki

maupun perempuan. Peningkatan TPT sekolah menengah pada perempuan sebesar 1,56 persen poin, sedangkan pada laki-laki meningkat sebesar 1,58 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa terjadi peningkatan TPT sekolah menengah baik di daerah perkotaan maupun perdesaan masing-masing sebesar 1,60 persen poin dan 1,53 persen poin.

“Dibandingkan dengan kondisi Agustus 2015 hanya terjadi peningkatan TPT pada yang tidak pernah sekolah”

Sementara itu jika dibandingkan dengan keadaan setahun sebelumnya penurunan TPT terjadi pada hampir semua jenjang pendidikan kecuali pada jenjang tidak pernah sekolah. TPT tidak pernah sekolah pada Agustus 2015 sebesar 1,25 persen naik menjadi 1,46 persen pada Agustus 2016.

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT Agustus 2016 pada tidak pernah sekolah dibandingkan dengan Agustus 2015 hanya terjadi pada perempuan sebesar 0,78 persen poin, sedangkan pada laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin. Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi kota-desa peningkatan TPT pada tidak pernah sekolah terjadi baik di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing naik sebesar 0,38 persen poin dan 0,17 persen poin.

“Pada Agustus 2015 dan Agustus 2016 persentase penganggur tertinggi terdapat pada tingkat sekolah menengah”

Tabel 6. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016

Tingkat Pendidikan	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,73	1,34	0,84
Laki-laki	0,69	0,78	0,43
Perempuan	0,80	2,30	1,54
Perkotaan	0,57	0,69	0,62
Perdesaan	1,00	2,44	1,20
Sekolah Dasar	36,38	43,99	38,60
Laki-laki	38,77	47,62	40,37
Perempuan	32,53	37,83	35,62
Perkotaan	28,87	38,19	32,64
Perdesaan	48,56	53,79	48,23
Sekolah Menengah	50,92	41,22	49,36
Laki-laki	50,99	41,92	50,60
Perempuan	50,79	40,02	47,29
Perkotaan	55,97	44,82	52,98
Perdesaan	42,71	35,13	43,52
Sekolah Tinggi	11,97	13,45	11,19
Laki-laki	9,54	9,68	8,60
Perempuan	15,87	19,85	15,56
Perkotaan	14,59	16,30	13,75
Perdesaan	7,72	8,64	7,05

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Tabel 6, memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang

tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Pada Agustus 2015 dan Agustus 2016 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah menengah, sementara pada periode Februari 2016 persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar.

Pada Agustus 2016, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah menengah mencapai 49,36 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 8,14 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2016 dan turun sebesar 1,56 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2015.

Selama periode Agustus 2015-Agustus 2016 penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah tinggi dengan penurunan sebesar 0,78 persen poin. Penurunan persentase penganggur pada tingkat sekolah tinggi terjadi baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal.

“Persentase penganggur berpendidikan sekolah tinggi pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki”

Mengamati lebih lanjut Tabel 6, baik pada keadaan Agustus 2015, Februari 2016 maupun Agustus 2016, persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Agustus 2016, diantara seluruh penganggur

perempuan yang memiliki pendidikan sekolah tinggi mencapai 15,56 persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki yang berpendidikan sekolah tinggi sebesar 8,60 persen.

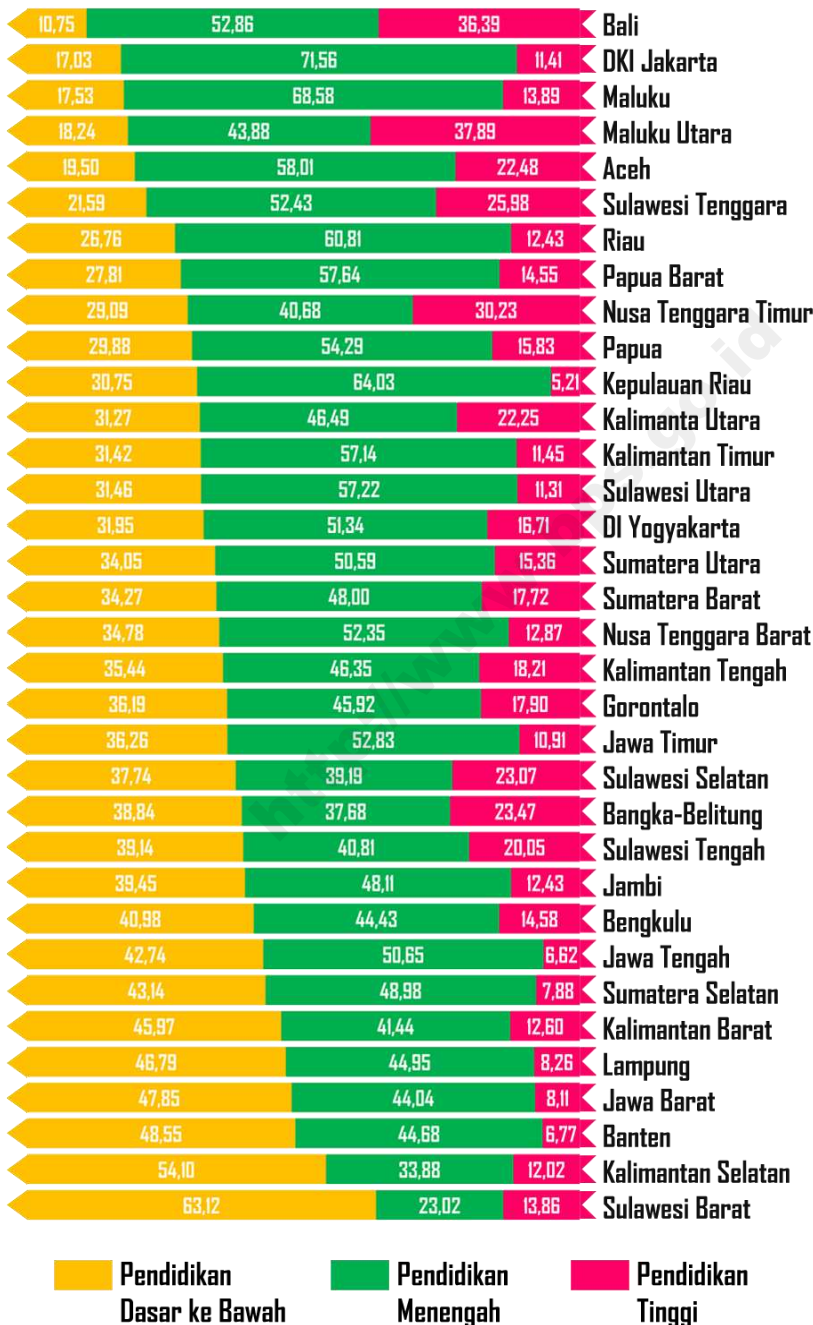
Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2015, Februari 2016 maupun Agustus 2016, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 6, pada Agustus 2016 persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 1,20 persen dan 48,23 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 0,62 persen dan 32,64 persen.

“Agustus 2016: Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Banten adalah tiga provinsi dengan persentase pengangguran berpendidikan dasar ke bawah paling tinggi”

Grafik 34 menunjukkan urutan provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan dasar ke bawah pada Agustus 2016, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (63,12 persen), Provinsi Kalimantan Selatan (54,10 persen), dan Provinsi Banten (48,55 persen).

Sedangkan tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang

berpendidikan tinggi secara berturut-turut yaitu Provinsi Maluku Utara (37,89 persen), Provinsi Bali (36,39 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (30,23 persen).



Grafik 34. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Agustus 2016

KILM 12. Setengah Pengangguran (*Underemployment*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

“Jumlah setengah penganggur Agustus 2016 mencapai 8,97 juta orang dan mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2016”

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Agustus 2016 mencapai 8,97 juta orang (Tabel 7), yang terdiri dari 5,56 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,41 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut klasifikasi kota-desa pada Agustus 2016, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai 5,85 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 3,12 juta orang.

Tabel 7. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2015–2016

Setengah Penganggur	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	
Laki-laki	6,08	6,42	5,56	
Perempuan	3,66	4,03	3,41	
Perkotaan	3,24	3,81	3,12	
Perdesaan	6,50	6,65	5,85	
Total	9,74	10,45	8,97	

Pada periode Sakernas Agustus 2016 menunjukkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sebanyak 1,48 juta orang dibandingkan dengan Februari 2016. Penurunan jumlah setengah penganggur tersebut terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan yaitu masing-masing sebanyak 860 ribu orang dan 620 ribu orang.

“Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja maupun terhadap total penduduk bekerja cenderung menurun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya”

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2016 sebesar 7,15 persen yang

berarti dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 7 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

Tren persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja selama periode Agustus 2015-Agustus 2016 cenderung fluktuatif. Dari sebesar 7,96 persen pada Agustus 2015 naik menjadi sebesar 8,19 persen pada Februari 2016, namun turun menjadi 7,15 persen pada Agustus 2016 (Tabel 8).

Tabel 8. Indikator Setengah Penganggur, 2015–2016

Setengah Penganggur (1)	2015	2016	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	7,96	8,19	7,15
Laki-laki	7,92	8,22	7,19
Perempuan	8,02	8,14	7,10
Perkotaan	5,07	5,64	4,74
Perdesaan	11,13	11,06	9,82
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	8,48	8,67	7,58
Laki-laki	8,43	8,71	7,63
Perempuan	8,57	8,59	7,50
Perkotaan	5,47	6,03	5,08
Perdesaan	11,70	11,56	10,28

Hal yang sama juga terjadi pada persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja yang juga cenderung fluktuatif selama periode Agustus 2015-Agustus 2016. Pada Agustus 2015, dari total penduduk bekerja sekitar 8,48 persen diantaranya setengah penganggur. Kemudian pada Februari 2016 naik menjadi sebesar 8,67 persen, namun turun menjadi 7,58 persen pada Agustus 2016.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Persentase penurunan pekerja setengah penganggur memiliki pola yang sama yaitu antara laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 1,08 persen poin dan 1,09 persen poin pada Agustus 2016.

Menilik perbedaan klasifikasi wilayah, selama periode Februari 2016-Agustus 2016 penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Pada Agustus 2016 bila dibandingkan dengan Februari 2016 daerah perkotaan dan perdesaan terjadi penurunan masing-masing sebesar 0,95 persen poin dan 1,28 persen poin.

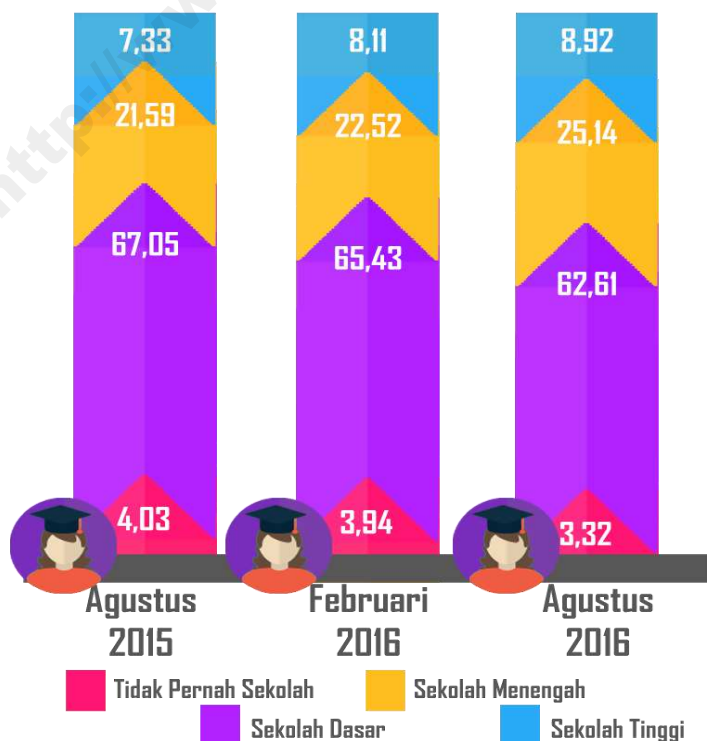
“Persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat sekolah dasar 62,61 persen”

Masih merujuk pada hasil Sakernas Agustus 2016, persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat

pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 62,61 persen. Dengan kata lain, dari 100 orang setengah penganggur 63 orang diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2016 terjadi penurunan persentase setengah penganggur pada tingkat sekolah dasar yaitu sebesar 2,82 persen poin.

Penurunan pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini diikuti dengan penurunan persentase setengah penganggur baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yaitu masing-masing sebesar 3,72 persen poin dan 1,43 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa penurunan juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan masing-masing sebesar 3,49 persen poin dan 2,77 persen poin (Tabel 9).

Grafik 35. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016



Tabel 9. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016

Tingkat Pendidikan	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,03	3,94	3,32
Laki-laki	2,99	2,96	2,38
Perempuan	5,75	5,50	4,86
Perkotaan	2,27	2,84	1,77
Perdesaan	4,90	4,57	4,15
Sekolah Dasar	67,05	65,43	62,62
Laki-laki	69,61	67,75	64,03
Perempuan	62,79	61,74	60,31
Perkotaan	58,51	57,29	53,80
Perdesaan	71,32	70,09	67,32
Sekolah Menengah	21,59	22,52	25,14
Laki-laki	22,45	23,36	27,13
Perempuan	20,16	21,19	21,90
Perkotaan	27,32	27,18	29,85
Perdesaan	18,73	19,86	22,63
Sekolah Tinggi	7,33	8,11	8,92
Laki-laki	4,95	5,94	6,46
Perempuan	11,30	11,57	12,93
Perkotaan	11,91	12,70	14,58
Perdesaan	5,05	5,48	5,90

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

“Tingkat ketidakaktifan mencapai 33,66 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 33,66 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 34 orang.

Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 yaitu dari 31,94 persen pada Februari 2016 menjadi 33,66 persen pada Agustus 2016. Sejalan dengan peningkatan tingkat ketidakaktifan, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebanyak 3,72 juta orang dari Februari 2016 (59,93 juta orang) ke Agustus 2016 (63,65 juta orang) (Lampiran 20).

Tabel 10. Indikator Ketidakaktifan (persen), 2015–2016

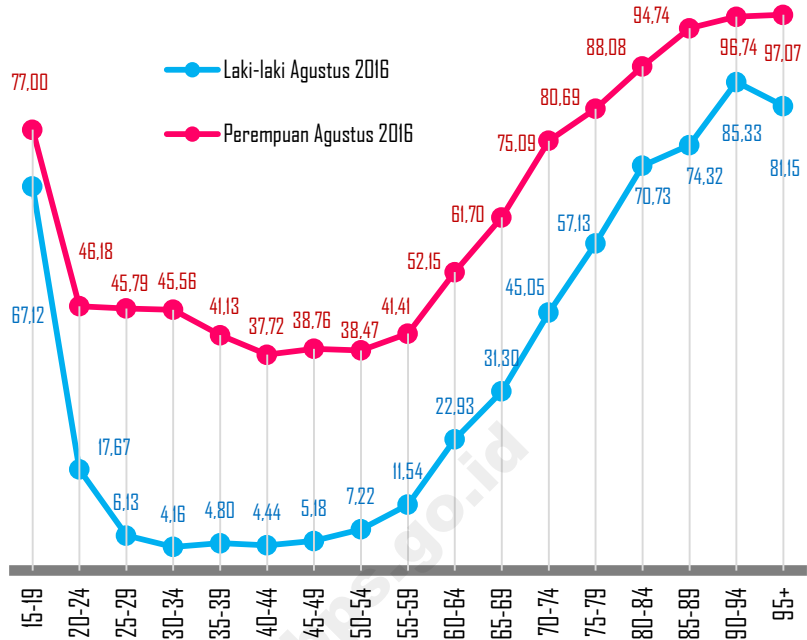
Tingkat Ketidakaktifan	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	17,29	16,54	18,03
Perempuan	51,13	47,29	49,23
Perkotaan	36,12	33,84	36,06
Perdesaan	32,05	29,68	30,79
Total	34,24	31,94	33,66

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 18 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 49 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, terjadi peningkatan tingkat ketidakaktifan pada perempuan sebesar 1,94 persen poin, sedangkan pada laki-laki sebesar 1,49 persen poin.

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Agustus 2016 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 36,06 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 30,79 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan pada Agustus 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,22 persen poin bila dibandingkan keadaan Februari 2016. Begitupun di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 1,11 persen poin, yaitu dari 29,68 persen pada Februari 2016 menjadi 30,79 persen pada Agustus 2016.

“Tingkat ketidakaktifan pada umur muda paling tinggi”

Grafik 36. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2016



Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Grafik 36 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf “J”).

Berdasarkan Grafik 36, secara umum tingkat ketidakaktifan menurut kelompok umur pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pada Agustus 2016, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 67,12 persen kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 4,16 persen pada kelompok umur (30–34) tahun, meningkat sedikit pada kelompok umur (35–39) tahun dengan angka 4,80 persen, kemudian turun kembali pada

kelompok umur berikutnya dan terus meningkat pada kelompok umur (45-49) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15-19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 77,00 persen, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 37,72 persen pada kelompok umur (40-44) tahun, meningkat sedikit pada kelompok umur (45-49) tahun dengan angka 38,76 persen, kemudian turun kembali pada kelompok umur berikutnya dan terus meningkat pada kelompok umur (55-59) tahun.

<http://www.bps.go.id>

BAB 4 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat.

KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education* (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

“Angkatan kerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD yaitu pada Agustus 2016 sebesar 55,82 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Februari 2016. Angkatan kerja pada Agustus 2016 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 55,82 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 28,74 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 12,19 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 3,25 persen.

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Agustus 2016, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 15,30 persen dibandingkan 10,25 persen.

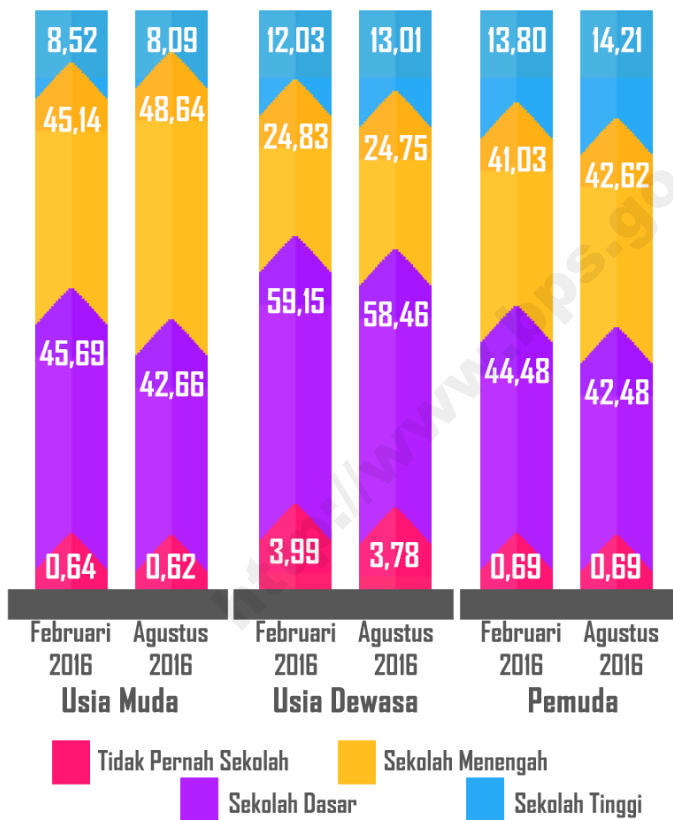
Tabel II. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2015–2016

Tingkat Pendidikan	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tidak Pernah Sekolah	3,63	3,44	3,25	
Laki-laki	2,51	2,27	2,24	
Perempuan	5,52	5,29	4,88	
Perkotaan	1,70	1,65	1,45	
Perdesaan	5,75	5,46	5,24	
Sekolah Dasar	57,11	56,95	55,82	
Laki-laki	57,56	57,17	56,27	
Perempuan	56,34	56,59	55,10	
Perkotaan	44,51	45,53	44,80	
Perdesaan	70,91	69,77	67,98	
Sekolah Menengah	28,19	28,15	28,74	
Laki-laki	30,50	30,94	31,24	
Perempuan	24,30	23,75	24,72	
Perkotaan	37,28	36,40	36,28	
Perdesaan	18,23	18,89	20,42	
Sekolah Tinggi	11,07	11,46	12,19	
Laki-laki	9,43	9,62	10,25	
Perempuan	13,84	14,37	15,30	
Perkotaan	16,51	16,42	17,47	
Perdesaan	5,11	5,88	6,36	

“Masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja usia muda dan pemuda yang tidak pernah sekolah ”

Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda dimana angkatan kerja juga didominasi

oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

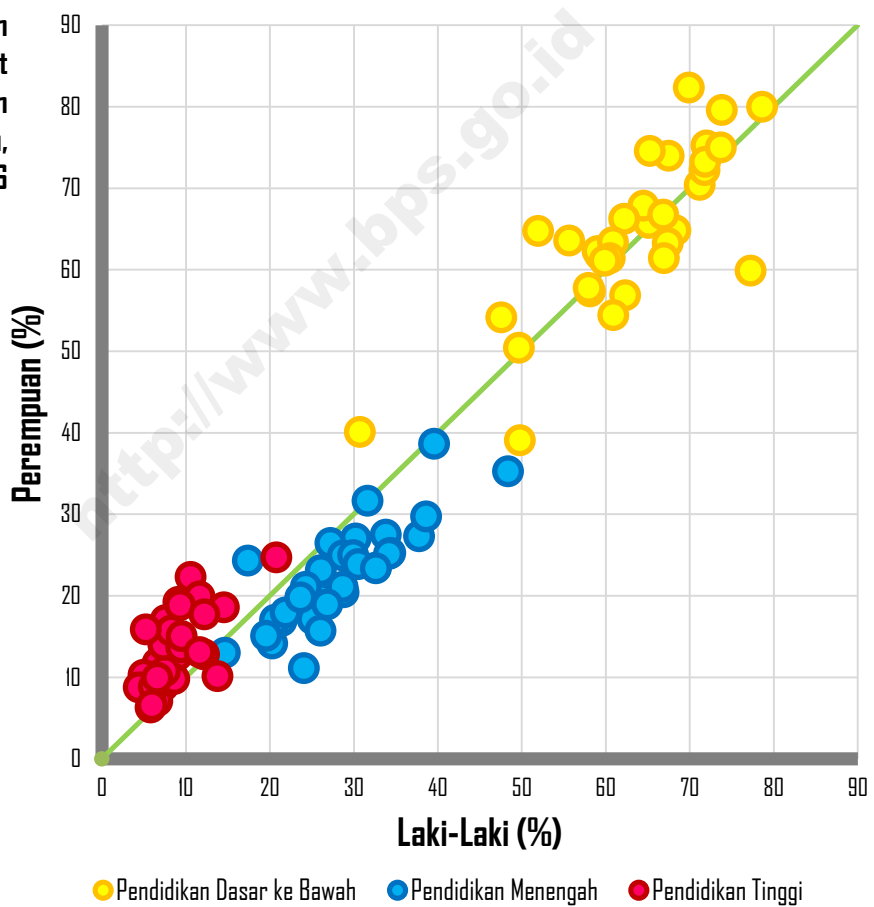


Grafik 37. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari 2016 dan Agustus 2016

“Angkatan kerja perempuan terkonsentrasi pada pendidikan rendah dan tinggi ”

Pada Agustus 2016, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar ke bawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.

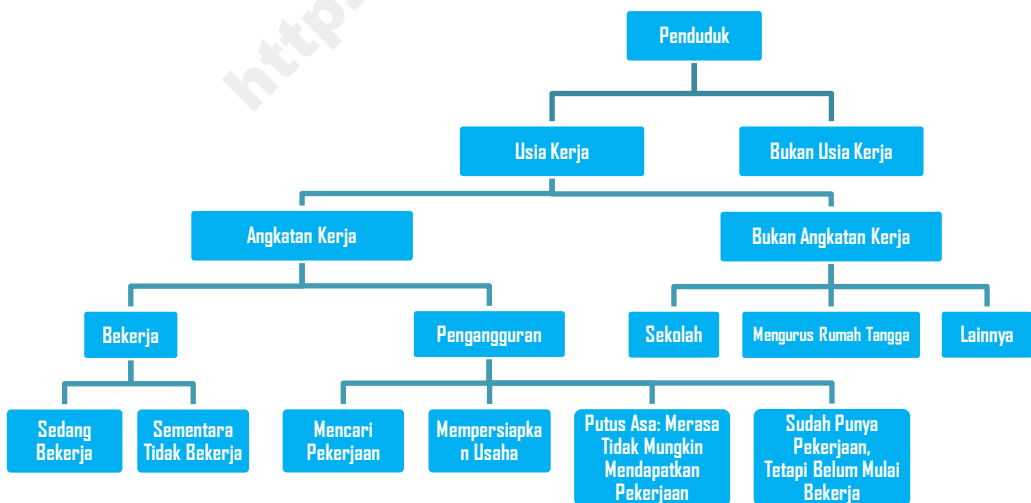
Grafik 38. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Agustus 2016



PENJELASAN TEKNIS

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku "Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods", ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun),

India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, Federasi Rumania, dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/ karyawan/pegawai

dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang

merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam

juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total. Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

Indikator Pasar Tenaga Kerja

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan

penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran), KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);

5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang

tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih

mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah

pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

1. Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
2. Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari:
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;

- c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
3. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pem-bangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
2. Pertambangan dan penggalian;
3. Industri pengolahan;

4. Listrik, gas, dan air;
5. Bangunan;
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
7. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
9. Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang

bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu

berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

4. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota

keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, *bukan* jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah

satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang

rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

1. Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;

- b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan $1 - \text{TPAK}$.

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah

tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional

Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

1. Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
2. Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
3. Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
4. Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun⁴⁾), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur

⁴⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Upah)–yang bukan merupakan bagian dari Sakernas–yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/ pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pen-dapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2015–2016

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 700	1 740	3 441	1 720	1 760	3 479	1 737	1 777	3 514
Sumatera Utara	4 686	4 812	9 499	4 724	4 850	9 574	4 759	4 883	9 642
Sumatera Barat	1 787	1 847	3 634	1 802	1 862	3 664	1 816	1 872	3 688
Riau	2 254	2 130	4 384	2 286	2 159	4 445	2 318	2 192	4 510
Jambi	1 253	1 197	2 450	1 266	1 209	2 475	1 281	1 225	2 506
Sumatera Selatan	2 909	2 832	5 741	2 934	2 856	5 790	2 958	2 879	5 837
Bengkulu	685	661	1 346	692	667	1 359	699	674	1 373
Lampung	2 997	2 845	5 842	3 019	2 866	5 884	3 036	2 885	5 921
Kep. Bangka Belitung	522	477	998	528	482	1 010	535	488	1 023
Kepulauan Riau	700	671	1 371	711	681	1 392	721	692	1 413
DKI Jakarta	3 832	3 839	7 671	3 857	3 863	7 720	3 861	3 879	7 740
Jawa Barat	17 229	16 889	34 117	17 384	17 038	34 422	17 540	17 207	34 747
Jawa Tengah	12 501	12 991	25 492	12 572	13 062	25 633	12 645	13 138	25 783
DI Yogyakarta	1 411	1 472	2 883	1 421	1 483	2 904	1 428	1 489	2 918
Jawa Timur	14 592	15 293	29 885	14 663	15 363	30 026	14 738	15 431	30 169
Banten	4 365	4 207	8 572	4 417	4 257	8 674	4 468	4 308	8 776
Bali	1 571	1 570	3 141	1 583	1 582	3 165	1 596	1 593	3 189
Nusa Tenggara Barat	1 607	1 783	3 390	1 621	1 797	3 418	1 634	1 809	3 443
Nusa Tenggara Timur	1 628	1 704	3 332	1 645	1 722	3 367	1 663	1 739	3 402
Kalimantan Barat	1 721	1 662	3 383	1 737	1 678	3 415	1 752	1 694	3 446
Kalimantan Tengah	942	847	1 790	954	858	1 812	969	870	1 839
Kalimantan Selatan	1 438	1 412	2 850	1 453	1 426	2 878	1 467	1 437	2 904
Kalimantan Timur	1 304	1 163	2 468	1 321	1 177	2 498	1 340	1 195	2 534
Kalimantan Utara	240	206	446	245	210	455	247	215	462
Sulawesi Utara	914	880	1 794	920	886	1 806	926	892	1 818
Sulawesi Tengah	1 046	1 004	2 050	1 056	1 014	2 070	1 065	1 023	2 088
Sulawesi Selatan	2 914	3 168	6 082	2 935	3 189	6 124	2 958	3 210	6 168
Sulawesi Tenggara	828	837	1 665	838	847	1 685	849	857	1 706
Gorontalo	404	409	814	408	413	821	410	418	828
Sulawesi Barat	436	442	877	441	446	887	446	452	898
Maluku	564	564	1 128	570	570	1 140	576	576	1 152
Maluku Utara	394	379	773	399	383	782	404	388	792
Papua Barat	321	281	602	326	285	611	331	290	621
Papua	1 167	1 022	2 189	1 180	1 034	2 213	1 197	1 049	2 245
Indonesia	92 864	93 237	186 101	93 626	93 975	187 601	94 372	94 725	189 097

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2015–2016

Kelompok Umur	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	
(1)	(2)	(3)	(4)	
15 Tahun ke atas	186,10	187,60	189,10	
Laki-laki	92,86	93,63	94,37	
Perempuan	93,24	93,97	94,72	
Perkotaan	100,17	102,09	102,95	
Perdesaan	85,93	85,51	86,15	
(15–64)	172,29	173,54	174,78	
Laki-laki	86,61	87,24	87,85	
Perempuan	85,68	86,30	86,92	
Perkotaan	93,37	95,08	95,79	
Perdesaan	78,92	78,46	78,99	
(15–24)	43,58	43,67	43,76	
Laki-laki	22,14	22,21	22,27	
Perempuan	21,44	21,46	21,49	
Perkotaan	23,83	24,14	24,19	
Perdesaan	19,74	19,53	19,58	
(25+)	142,53	143,93	145,34	
Laki-laki	70,72	71,42	72,10	
Perempuan	71,80	72,51	73,23	
Perkotaan	76,33	77,95	78,76	
Perdesaan	66,19	65,98	66,57	
(25–54)	109,64	110,33	111,01	
Laki-laki	54,85	55,19	55,53	
Perempuan	54,79	55,13	55,48	
Perkotaan	59,70	60,73	61,15	
Perdesaan	49,94	49,59	49,86	
(25–34)	41,29	41,36	41,43	
Laki-laki	20,64	20,69	20,74	
Perempuan	20,65	20,67	20,69	
Perkotaan	22,94	23,21	23,25	
Perdesaan	18,35	18,15	18,18	
(35–54)	68,35	68,97	69,58	
Laki-laki	34,21	34,50	34,79	
Perempuan	34,15	34,47	34,79	
Perkotaan	36,77	37,52	37,90	
Perdesaan	31,59	31,45	31,68	
(55–64)	19,07	19,54	20,01	
Laki-laki	9,61	9,84	10,05	
Perempuan	9,46	9,70	9,95	
Perkotaan	9,83	10,20	10,45	
Perdesaan	9,24	9,34	9,55	
65 Tahun ke atas	13,81	14,06	14,32	
Laki-laki	6,26	6,39	6,52	
Perempuan	7,55	7,67	7,80	
Perkotaan	6,80	7,02	7,16	
Perdesaan	7,01	7,05	7,16	

**Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk
Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2015–2016**

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 379	804	2 183	1 403	832	2 235	1 418	840	2 258
Sumatera Utara	3 861	2 530	6 391	3 913	2 681	6 594	3 781	2 582	6 363
Sumatera Barat	1 423	923	2 346	1 470	1 108	2 577	1 473	1 001	2 474
Riau	1 875	896	2 771	1 930	1 048	2 978	1 962	1 026	2 988
Jambi	1 061	560	1 621	1 077	619	1 696	1 097	595	1 692
Sumatera Selatan	2 440	1 494	3 935	2 542	1 511	4 054	2 518	1 660	4 179
Bengkulu	582	369	951	590	409	1 000	594	404	998
Lampung	2 564	1 268	3 832	2 601	1 438	4 038	2 617	1 505	4 122
Kep. Bangka Belitung	441	224	666	442	245	688	447	259	705
Kepulauan Riau	606	286	892	627	286	913	610	321	931
DKI Jakarta	3 164	1 928	5 092	3 202	2 108	5 311	3 217	1 962	5 179
Jawa Barat	14 044	6 543	20 586	14 540	7 637	22 177	14 141	6 935	21 076
Jawa Tengah	10 298	7 001	17 299	10 385	7 529	17 915	10 226	7 086	17 312
DI Yogyakarta	1 128	844	1 971	1 156	941	2 097	1 175	925	2 099
Jawa Timur	12 256	8 019	20 275	12 225	8 273	20 498	11 921	8 033	19 954
Banten	3 582	1 753	5 335	3 645	2 041	5 686	3 636	1 951	5 587
Bali	1 316	1 056	2 372	1 342	1 040	2 382	1 339	1 124	2 463
Nusa Tenggara Barat	1 311	945	2 256	1 316	1 066	2 383	1 343	1 122	2 464
Nusa Tenggara Timur	1 312	996	2 308	1 336	1 109	2 445	1 325	1 029	2 354
Kalimantan Barat	1 444	913	2 357	1 470	946	2 416	1 475	914	2 389
Kalimantan Tengah	819	454	1 272	832	454	1 286	845	467	1 311
Kalimantan Selatan	1 227	760	1 987	1 245	807	2 052	1 252	827	2 078
Kalimantan Timur	1 091	448	1 539	1 112	539	1 650	1 148	570	1 718
Kalimantan Utara	199	84	283	211	75	287	206	83	289
Sulawesi Utara	745	354	1 099	775	409	1 184	757	427	1 184
Sulawesi Tengah	893	491	1 384	909	586	1 495	925	585	1 510
Sulawesi Selatan	2 303	1 404	3 706	2 331	1 444	3 775	2 357	1 524	3 881
Sulawesi Tenggara	687	451	1 138	704	508	1 212	727	526	1 254
Gorontalo	330	188	518	345	218	563	340	222	562
Sulawesi Barat	375	242	617	378	264	642	396	250	646
Maluku	441	286	727	440	293	733	444	299	743
Maluku Utara	330	184	514	333	198	531	335	190	525
Papua Barat	261	153	414	273	164	437	283	152	435
Papua	1 023	719	1 742	1 036	707	1 743	1 027	695	1 722
Indonesia	76 811	45 569	122 380	78 138	49 534	127 672	77 355	48 089	125 444

**Lampiran 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur (juta),
2015–2016**

Kelompok Umur	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja	114,82	120,65	118,41
Laki-laki	72,15	73,72	72,94
Perempuan	42,67	46,93	45,47
Perkotaan	59,31	63,13	61,48
Perdesaan	55,51	57,51	56,93
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	15,75	17,17	16,88
Laki-laki	9,61	10,52	10,21
Perempuan	6,14	6,65	6,67
Perkotaan	8,24	9,14	8,88
Perdesaan	7,51	8,03	8,00
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	99,07	103,48	101,53
Laki-laki	62,54	63,20	62,73
Perempuan	36,53	40,28	38,80
Perkotaan	51,07	54,00	52,60
Perdesaan	48,00	49,48	48,94

Lampiran 5. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2015–2016

Kelompok Umur	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	122,38	127,67	125,44
Laki-laki	76,81	78,14	77,36
Perempuan	45,57	49,53	48,09
Perkotaan	63,99	67,54	65,82
Perdesaan	58,39	60,13	59,62
(15–64)	117,12	121,83	119,79
Laki-laki	73,47	74,57	73,75
Perempuan	43,65	47,27	46,03
Perkotaan	61,82	65,08	63,53
Perdesaan	55,30	56,75	56,26
(15–24)	20,34	20,90	20,95
Laki-laki	12,36	12,73	12,73
Perempuan	7,99	8,17	8,23
Perkotaan	10,91	11,29	11,25
Perdesaan	9,43	9,61	9,71
(25–54)	83,82	87,21	85,05
Laki-laki	53,02	53,51	52,62
Perempuan	30,80	33,70	32,42
Perkotaan	44,88	47,34	45,74
Perdesaan	38,94	39,87	39,30
(25–34)	30,54	31,44	30,91
Laki-laki	19,79	19,91	19,67
Perempuan	10,75	11,53	11,24
Perkotaan	17,03	17,80	17,37
Perdesaan	13,50	13,64	13,54
(35–54)	53,29	55,77	54,14
Laki-laki	33,24	33,60	32,95
Perempuan	20,05	22,17	21,18
Perkotaan	27,85	29,55	28,38
Perdesaan	25,44	26,23	25,76
(55–64)	12,95	13,72	13,79
Laki-laki	8,09	8,32	8,41
Perempuan	4,86	5,40	5,38
Perkotaan	6,03	6,45	6,54
Perdesaan	6,92	7,27	7,25
65 Tahun ke atas	5,26	5,84	5,66
Laki-laki	3,34	3,57	3,60
Perempuan	1,92	2,27	2,06
Perkotaan	2,16	2,46	2,29
Perdesaan	3,10	3,38	3,36

**Lampiran 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Kelompok Umur (persen), 2015–2016**

Kelompok Umur	2015	2016	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	65,76	68,06	66,34
Laki-laki	82,71	83,46	81,97
Perempuan	48,87	52,71	50,77
Perkotaan	63,88	66,16	63,94
Perdesaan	67,95	70,32	69,21
(15–64)	67,98	70,20	68,54
Laki-laki	84,84	85,47	83,95
Perempuan	50,94	54,77	52,96
Perkotaan	66,21	68,46	66,32
Perdesaan	70,06	72,32	71,22
(15–24)	46,69	47,86	47,88
Laki-laki	55,81	57,34	57,15
Perempuan	37,26	38,05	38,29
Perkotaan	45,79	46,76	46,51
Perdesaan	47,77	49,23	49,58
(25–54)	76,45	79,05	76,61
Laki-laki	96,66	96,95	94,76
Perempuan	56,22	61,12	58,44
Perkotaan	75,18	77,95	74,80
Perdesaan	77,98	80,38	78,83
(25–34)	73,96	76,01	74,61
Laki-laki	95,84	96,22	94,84
Perempuan	52,08	55,77	54,32
Perkotaan	74,27	76,67	74,68
Perdesaan	73,57	75,17	74,51
(35–54)	77,96	80,87	77,80
Laki-laki	97,16	97,38	94,71
Perempuan	58,71	64,34	60,89
Perkotaan	75,74	78,75	74,88
Perdesaan	80,53	83,39	81,30
(55–64)	67,91	70,22	68,91
Laki-laki	84,20	84,61	83,61
Perempuan	51,36	55,64	54,07
Perkotaan	61,30	63,27	62,55
Perdesaan	74,95	77,81	75,87
65 Tahun ke atas	38,09	41,53	39,50
Laki-laki	53,33	55,91	55,25
Perempuan	25,47	29,55	26,35
Perkotaan	31,81	35,05	32,03
Perdesaan	44,18	47,97	46,97

**Lampiran 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2015–2016**

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	81,10	46,19	63,44	81,62	47,26	64,24	81,62	47,27	64,26
Sumatera Utara	82,38	52,58	67,28	82,83	55,27	68,87	79,44	52,88	65,99
Sumatera Barat	79,63	49,97	64,56	81,55	59,49	70,34	81,10	53,48	67,08
Riau	83,20	42,08	63,22	84,46	48,53	67,01	84,65	46,80	66,25
Jambi	84,65	46,77	66,14	85,13	51,17	68,53	85,65	48,60	67,54
Sumatera Selatan	83,89	52,76	68,53	86,65	52,92	70,01	85,13	57,67	71,59
Bengkulu	85,02	55,78	70,67	85,35	61,40	73,59	85,02	59,91	72,69
Lampung	85,56	44,57	65,60	86,16	50,17	68,63	86,18	52,17	69,61
Kep. Bangka Belitung	84,62	47,10	66,71	83,76	50,87	68,06	83,49	52,98	68,93
Kepulauan Riau	86,63	42,58	65,07	88,22	41,98	65,58	84,63	46,45	65,93
DKI Jakarta	82,58	50,22	66,39	83,03	54,58	68,79	83,31	50,58	66,91
Jawa Barat	81,51	38,74	60,34	83,64	44,83	64,43	80,62	40,30	60,65
Jawa Tengah	82,38	53,89	67,86	82,61	57,65	69,89	80,87	53,94	67,15
DI Yogyakarta	79,95	57,30	68,38	81,33	63,45	72,20	82,24	62,10	71,96
Jawa Timur	83,99	52,43	67,84	83,38	53,85	68,27	80,89	52,06	66,14
Banten	82,06	41,67	62,24	82,52	47,95	65,56	81,38	45,29	63,66
Bali	83,77	67,24	75,51	84,78	65,78	75,28	83,90	70,56	77,24
Nusa Tenggara Barat	81,59	52,98	66,54	81,22	59,34	69,71	82,18	61,99	71,57
Nusa Tenggara Timur	80,58	58,43	69,25	81,23	64,41	72,63	79,68	59,15	69,18
Kalimantan Barat	83,92	54,93	69,68	84,63	56,37	70,75	84,19	53,93	69,32
Kalimantan Tengah	86,90	53,55	71,11	87,18	52,94	70,97	87,20	53,61	71,30
Kalimantan Selatan	85,29	53,87	69,73	85,72	56,59	71,30	85,32	57,54	71,57
Kalimantan Timur	83,64	38,56	62,39	84,17	45,74	66,06	85,72	47,69	67,79
Kalimantan Utara	82,90	40,75	63,45	86,13	35,92	62,96	83,12	38,57	62,40
Sulawesi Utara	81,54	40,26	61,28	84,25	46,14	65,55	81,70	47,87	65,11
Sulawesi Tengah	85,38	48,89	67,51	86,04	57,79	72,20	86,81	57,16	72,28
Sulawesi Selatan	79,01	44,31	60,94	79,41	45,29	61,64	79,69	47,47	62,92
Sulawesi Tenggara	82,92	53,93	68,35	84,03	59,93	71,92	85,62	61,42	73,47
Gorontalo	81,73	45,80	63,65	84,58	52,83	68,60	82,91	53,12	67,89
Sulawesi Barat	85,94	54,80	70,27	85,64	59,13	72,30	88,66	55,34	71,90
Maluku	78,16	50,77	64,47	77,25	51,40	64,33	77,04	51,97	64,51
Maluku Utara	83,58	48,56	66,43	83,35	51,66	67,83	82,80	48,88	66,19
Papua Barat	81,25	54,31	68,68	83,71	57,54	71,50	85,49	52,40	70,05
Papua	87,66	70,33	79,57	87,87	68,38	78,77	85,85	66,25	76,70
Indonesia	82,71	48,87	65,76	83,46	52,71	68,06	81,97	50,77	66,34

Lampiran 8. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2015–2016

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 263	704	1 966	1 301	752	2 053	1 318	769	2 087
Sumatera Utara	3 626	2 336	5 962	3 689	2 477	6 166	3 577	2 414	5 991
Sumatera Barat	1 328	856	2 185	1 385	1 042	2 427	1 400	948	2 348
Riau	1 760	794	2 554	1 834	967	2 801	1 826	940	2 766
Jambi	1 018	532	1 550	1 033	584	1 617	1 055	570	1 625
Sumatera Selatan	2 297	1 399	3 696	2 421	1 474	3 894	2 408	1 591	3 999
Bengkulu	557	348	904	572	390	962	574	391	965
Lampung	2 452	1 183	3 635	2 493	1 362	3 855	2 499	1 432	3 931
Kep. Bangka Belitung	418	206	624	419	226	645	436	251	687
Kepulauan Riau	569	267	837	564	267	830	564	296	860
DKI Jakarta	2 925	1 799	4 724	2 985	2 020	5 005	3 008	1 853	4 862
Jawa Barat	12 865	5 926	18 791	13 256	7 021	20 277	12 816	6 386	19 202
Jawa Tengah	9 725	6 710	16 435	9 894	7 268	17 162	9 703	6 809	16 511
DI Yogyakarta	1 086	805	1 891	1 115	923	2 038	1 131	911	2 042
Jawa Timur	11 707	7 661	19 368	11 761	7 888	19 649	11 493	7 622	19 115
Banten	3 246	1 579	4 825	3 332	1 903	5 234	3 308	1 781	5 088
Bali	1 287	1 038	2 325	1 299	1 033	2 332	1 310	1 107	2 417
Nusa Tenggara Barat	1 223	904	2 128	1 260	1 035	2 295	1 282	1 086	2 367
Nusa Tenggara Timur	1 270	949	2 219	1 291	1 066	2 358	1 287	991	2 277
Kalimantan Barat	1 363	873	2 236	1 404	901	2 305	1 410	878	2 288
Kalimantan Tengah	784	431	1 215	809	430	1 239	804	444	1 248
Kalimantan Selatan	1 166	723	1 890	1 195	783	1 978	1 189	776	1 965
Kalimantan Timur	1 016	408	1 424	1 003	501	1 504	1 052	529	1 581
Kalimantan Utara	189	78	267	203	72	275	194	79	273
Sulawesi Utara	692	308	1 000	730	362	1 091	727	383	1 111
Sulawesi Tengah	863	465	1 327	886	557	1 443	903	557	1 460
Sulawesi Selatan	2 174	1 311	3 485	2 206	1 376	3 582	2 255	1 440	3 695
Sulawesi Tenggara	657	418	1 075	680	486	1 166	707	513	1 220
Gorontalo	317	177	494	333	209	542	333	214	547
Sulawesi Barat	366	230	596	368	257	624	385	240	624
Maluku	405	250	655	413	270	682	413	278	691
Maluku Utara	314	169	483	327	185	513	325	179	503
Papua Barat	243	137	380	257	155	412	263	139	402
Papua	980	693	1 672	1 002	690	1 691	990	675	1 664
Indonesia	72 151	42 669	114 819	73 717	46 931	120 648	72 944	45 468	118 412

Lampiran 9. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2015–2016

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	74,26	40,42	57,14	75,65	42,75	59,01	75,86	43,29	59,39
Sumatera Utara	77,37	48,55	62,77	78,09	51,07	64,40	75,16	49,44	62,14
Sumatera Barat	74,31	46,37	60,11	76,88	55,97	66,25	77,10	50,63	63,66
Riau	78,08	37,30	58,27	80,25	44,79	63,02	78,79	42,87	61,33
Jambi	81,26	44,44	63,27	81,61	48,32	65,34	82,34	46,53	64,84
Sumatera Selatan	78,96	49,39	64,37	82,50	51,59	67,26	81,39	55,26	68,50
Bengkulu	81,25	52,63	67,20	82,65	58,45	70,77	82,20	57,95	70,29
Lampung	81,82	41,59	62,23	82,58	47,53	65,51	82,32	49,64	66,39
Kep. Bangka Belitung	80,17	43,19	62,51	79,37	46,89	63,86	81,52	51,38	67,14
Kepulauan Riau	81,34	39,85	61,03	79,34	39,13	59,66	78,25	42,75	60,86
DKI Jakarta	76,32	46,88	61,59	77,38	52,29	64,83	77,91	47,79	62,82
Jawa Barat	74,67	35,09	55,08	76,25	41,21	58,91	73,07	37,11	55,26
Jawa Tengah	77,79	51,65	64,47	78,70	55,65	66,95	76,73	51,82	64,04
DI Yogyakarta	76,98	54,70	65,60	78,43	62,25	70,17	79,22	61,17	70,00
Jawa Timur	80,23	50,09	64,81	80,21	51,34	65,44	77,98	49,39	63,36
Banten	74,38	37,54	56,30	75,42	44,70	60,35	74,02	41,34	57,98
Bali	81,91	66,10	74,01	82,04	65,34	73,69	82,08	69,47	75,78
Nusa Tenggara Barat	76,10	50,73	62,76	77,76	57,61	67,16	78,43	60,00	68,75
Nusa Tenggara Timur	78,01	55,70	66,60	78,49	61,93	70,02	77,38	56,94	66,93
Kalimantan Barat	79,20	52,51	66,09	80,83	53,70	67,51	80,46	51,83	66,39
Kalimantan Tengah	83,18	50,87	67,88	84,79	50,10	68,36	82,97	51,05	67,87
Kalimantan Selatan	81,09	51,23	66,30	82,26	54,91	68,71	81,05	54,02	67,67
Kalimantan Timur	77,90	35,06	57,71	75,97	42,52	60,21	78,57	44,27	62,40
Kalimantan Utara	78,50	38,07	59,85	82,84	34,43	60,50	78,61	36,73	59,14
Sulawesi Utara	75,72	35,02	55,75	79,31	40,81	60,42	78,50	42,98	61,08
Sulawesi Tengah	82,47	46,27	64,74	83,86	54,96	69,71	84,79	54,41	69,90
Sulawesi Selatan	74,61	41,39	57,31	75,18	43,14	58,49	76,22	44,86	59,90
Sulawesi Tenggara	79,38	49,89	64,56	81,11	57,41	69,20	83,21	59,83	71,47
Gorontalo	78,46	43,14	60,69	81,58	50,50	65,94	81,09	51,20	66,01
Sulawesi Barat	84,02	52,02	67,91	83,36	57,48	70,34	86,16	53,05	69,51
Maluku	71,76	44,37	58,07	72,37	47,30	59,84	71,60	48,32	59,97
Maluku Utara	79,50	44,61	62,41	81,90	48,41	65,50	80,32	46,04	63,53
Papua Barat	75,80	48,65	63,13	78,88	54,28	67,40	79,40	48,15	64,82
Papua	83,95	67,78	76,40	84,93	66,72	76,43	82,72	64,32	74,13
Indonesia	77,69	45,76	61,70	78,74	49,94	64,31	77,29	48,00	62,62

Lampiran 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2015–2016

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri + Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	35,04	38,08	38,64	4,45	3,46	4,19	34,90	37,24	34,01
Sumatera Utara	36,81	38,45	36,27	3,05	3,35	3,75	34,40	32,97	32,40
Sumatera Barat	31,91	30,74	33,57	3,67	4,23	4,63	38,77	38,35	34,68
Riau	46,29	41,20	41,53	5,07	5,05	4,84	28,84	33,57	32,72
Jambi	37,40	37,87	33,79	3,95	3,98	4,12	35,36	36,47	38,52
Sumatera Selatan	35,41	31,25	35,16	3,27	2,69	4,13	35,13	38,22	36,57
Bengkulu	28,06	31,27	30,61	3,12	4,43	3,47	39,01	38,19	37,49
Lampung	25,43	28,04	26,78	3,75	2,80	3,11	37,66	38,68	39,17
Kep. Bangka Belitung	41,60	44,58	38,42	4,27	5,74	6,00	33,34	32,58	34,90
Kepulauan Riau	68,49	64,83	63,78	3,42	3,14	2,41	21,27	23,95	25,33
DKI Jakarta	68,16	64,47	64,51	4,80	4,53	4,19	19,66	22,24	24,12
Jawa Barat	46,24	45,76	47,34	3,37	3,16	4,01	28,64	30,60	28,47
Jawa Tengah	34,72	34,29	34,80	3,56	3,15	3,03	34,16	36,24	34,64
DI Yogyakarta	45,31	38,11	41,58	3,48	3,52	3,51	29,58	33,64	34,19
Jawa Timur	32,94	33,81	34,13	3,87	3,14	3,75	33,78	34,36	32,32
Banten	58,58	55,29	56,97	2,88	4,42	4,54	22,91	24,27	21,28
Bali	42,95	43,29	42,00	4,25	3,64	3,68	29,19	33,35	33,88
Nusa Tenggara Barat	24,03	24,44	23,57	2,77	2,44	3,32	38,69	40,64	40,34
Nusa Tenggara Timur	19,80	20,24	23,52	1,61	1,34	1,68	44,64	44,11	46,25
Kalimantan Barat	31,27	33,95	33,94	3,17	3,16	4,25	37,68	35,47	38,43
Kalimantan Tengah	42,26	40,42	37,99	3,30	2,74	3,36	33,49	36,44	38,62
Kalimantan Selatan	38,07	33,90	34,40	3,41	3,45	3,41	35,86	39,75	39,72
Kalimantan Timur	56,04	51,70	50,95	4,30	3,82	4,31	26,00	29,43	31,48
Kalimantan Utara	52,00	51,20	50,74	4,82	4,37	6,24	31,16	32,98	32,50
Sulawesi Utara	36,41	39,39	34,46	4,04	3,77	4,22	34,45	34,24	35,25
Sulawesi Tengah	28,73	27,17	29,33	4,64	3,05	4,22	40,77	42,28	37,35
Sulawesi Selatan	33,45	33,34	31,82	3,50	3,25	3,29	38,59	41,17	39,11
Sulawesi Tenggara	27,31	29,84	27,20	3,17	4,56	4,27	39,30	38,88	38,90
Gorontalo	33,26	32,75	35,98	3,88	5,26	3,71	39,50	39,32	40,18
Sulawesi Barat	23,45	25,86	26,95	2,87	3,67	2,90	42,51	42,16	44,86
Maluku	30,08	31,60	34,13	1,90	2,65	1,63	42,59	44,80	44,38
Maluku Utara	28,02	29,43	32,01	3,38	2,83	3,96	40,39	42,35	40,67
Papua Barat	36,91	39,65	38,38	2,54	1,44	2,19	37,64	37,42	38,68
Papua	17,56	20,93	20,22	0,95	1,64	1,41	42,91	42,98	45,28
Indonesia	38,70	38,38	38,70	3,54	3,34	3,70	32,85	34,31	33,33

Lanjutan Lampiran 10

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan ^{*)}		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)
Aceh	9,53	9,41	9,60	16,08	11,81	13,55	60,50	58,46	57,17
Sumatera Utara	8,47	9,08	7,17	17,27	16,14	20,42	60,14	58,19	59,98
Sumatera Barat	11,91	11,97	11,94	13,73	14,71	15,18	64,41	65,03	61,80
Riau	9,81	7,60	9,50	9,99	12,58	11,41	48,64	53,75	53,63
Jambi	8,41	7,32	6,76	14,87	14,36	16,81	58,65	58,15	62,09
Sumatera Selatan	5,43	4,64	4,90	20,75	23,20	19,24	61,31	66,07	60,71
Bengkulu	8,82	7,23	9,04	20,99	18,88	19,39	68,81	64,30	65,92
Lampung	13,68	12,01	10,90	19,49	18,46	20,03	70,83	69,16	70,10
Kep. Bangka Belitung	7,40	5,39	6,10	13,38	11,71	14,57	54,13	49,68	55,57
Kepulauan Riau	2,71	3,48	3,03	4,12	4,59	5,45	28,10	32,03	33,80
DKI Jakarta	2,65	2,69	2,12	4,74	6,07	5,05	27,04	31,00	31,29
Jawa Barat	14,64	12,98	13,79	7,11	7,50	6,38	50,39	51,07	48,64
Jawa Tengah	14,21	12,81	13,91	13,35	13,51	13,62	61,72	62,55	62,17
DI Yogyakarta	9,72	11,44	8,19	11,92	13,29	12,53	51,21	58,37	54,91
Jawa Timur	13,73	13,85	14,78	15,68	14,84	15,02	63,19	63,05	62,12
Banten	9,46	9,55	10,39	6,17	6,47	6,82	38,54	40,29	38,49
Bali	9,85	6,64	8,11	13,75	13,08	12,33	52,80	53,07	54,32
Nusa Tenggara Barat	19,91	15,86	15,42	14,60	16,61	17,35	73,20	73,11	73,11
Nusa Tenggara Timur	3,05	4,45	3,49	30,90	29,86	25,06	78,60	78,42	74,80
Kalimantan Barat	5,49	6,97	5,76	22,40	20,44	17,63	65,56	62,89	61,81
Kalimantan Tengah	4,82	3,81	3,55	16,13	16,59	16,48	54,44	56,84	58,65
Kalimantan Selatan	7,30	5,58	6,06	15,37	17,32	16,41	58,52	62,65	62,19
Kalimantan Timur	6,31	5,35	3,11	7,35	9,70	10,16	39,66	44,49	44,75
Kalimantan Utara	2,64	3,71	2,13	9,38	7,75	8,39	43,18	44,43	43,02
Sulawesi Utara	16,36	14,31	16,12	8,74	8,29	9,94	59,55	56,84	61,32
Sulawesi Tengah	7,69	8,05	10,22	18,16	19,45	18,88	66,63	69,78	66,45
Sulawesi Selatan	5,51	4,82	7,10	18,95	17,42	18,67	63,05	63,41	64,89
Sulawesi Tenggara	5,78	3,94	6,06	24,43	22,78	23,57	69,52	65,60	68,53
Gorontalo	12,08	8,53	8,49	11,28	14,14	11,64	62,86	61,98	60,31
Sulawesi Barat	6,16	4,57	6,50	25,00	23,74	18,79	73,68	70,47	70,15
Maluku	3,78	4,79	3,61	21,65	16,16	16,26	68,02	65,75	64,24
Maluku Utara	6,23	3,89	5,71	21,98	21,49	17,65	68,60	67,74	64,03
Papua Barat	3,42	2,51	4,91	19,50	18,98	15,83	60,55	58,91	59,43
Papua	1,44	0,69	1,10	37,14	33,76	31,99	81,49	77,43	78,37
Indonesia	10,92	10,14	10,53	13,99	13,83	13,74	57,76	58,28	57,60

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Lampiran II. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2015–2016

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-Jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-Jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	44,83	12,73	42,44	35,95	14,57	49,48	35,22	13,86	50,92
Sumatera Utara	41,30	14,22	44,49	40,51	15,42	44,07	44,50	13,99	41,51
Sumatera Barat	39,20	13,69	47,11	37,40	13,70	48,90	36,44	16,88	46,68
Riau	42,61	13,41	43,99	41,44	13,68	44,88	41,88	15,41	42,71
Jambi	52,86	10,07	37,07	47,03	11,82	41,15	49,29	12,84	37,87
Sumatera Selatan	54,74	10,97	34,29	51,14	11,21	37,65	48,43	11,66	39,91
Bengkulu	54,21	10,03	35,76	43,59	12,24	44,17	42,35	12,43	45,22
Lampung	48,78	16,20	35,02	48,23	15,23	36,54	48,28	14,59	37,14
Kep. Bangka Belitung	36,63	22,96	40,40	32,00	20,99	47,01	32,13	23,61	44,26
Kepulauan Riau	11,03	35,00	53,97	12,80	31,29	55,91	11,97	25,23	62,80
DKI Jakarta	0,42	19,89	79,68	0,33	16,80	82,87	1,10	13,72	85,18
Jawa Barat	16,47	31,09	52,44	17,47	27,79	54,74	16,43	28,56	55,01
Jawa Tengah	28,66	30,15	41,19	30,07	27,09	42,83	30,69	29,33	39,97
DI Yogyakarta	23,08	23,77	53,15	22,81	27,25	49,94	23,27	20,64	56,09
Jawa Timur	36,57	22,54	40,89	35,66	22,65	41,69	36,49	23,03	40,47
Banten	13,02	31,90	55,09	12,86	31,96	55,18	13,88	31,56	54,56
Bali	22,40	21,48	56,12	21,95	21,69	56,36	20,95	22,66	56,39
Nusa Tenggara Barat	39,01	18,52	42,47	43,75	16,82	39,43	38,90	18,00	43,10
Nusa Tenggara Timur	61,65	10,52	27,82	59,44	9,57	30,98	53,32	13,59	33,09
Kalimantan Barat	57,81	10,42	31,77	49,38	13,87	36,75	48,63	14,19	37,18
Kalimantan Tengah	46,32	15,18	38,50	40,93	16,97	42,10	36,20	22,00	41,80
Kalimantan Selatan	36,01	16,16	47,83	37,48	16,97	45,54	36,05	14,67	49,27
Kalimantan Timur	22,50	22,86	54,65	20,65	18,36	60,99	21,85	20,58	57,57
Kalimantan Utara	34,65	15,18	50,17	30,12	19,43	50,44	31,43	18,17	50,41
Sulawesi Utara	31,93	17,42	50,65	29,12	16,53	54,35	35,83	14,89	49,28
Sulawesi Tengah	50,03	11,59	38,37	43,67	12,57	43,76	45,89	13,58	40,52
Sulawesi Selatan	41,73	13,86	44,41	40,28	14,12	45,60	39,73	16,22	44,05
Sulawesi Tenggara	45,52	14,07	40,41	36,79	16,10	47,11	38,92	16,38	44,70
Gorontalo	34,66	16,30	49,04	28,56	19,32	52,12	30,63	15,41	53,96
Sulawesi Barat	58,53	12,20	29,27	50,13	16,61	33,26	49,76	18,22	32,02
Maluku	46,79	9,52	43,69	35,95	13,67	50,38	39,13	14,05	46,82
Maluku Utara	50,23	11,13	38,64	43,95	14,79	41,27	40,82	16,62	42,56
Papua Barat	42,11	10,57	47,32	39,50	13,04	47,46	36,95	12,93	50,12
Papua	73,93	4,59	21,47	68,58	5,99	25,43	65,83	5,55	28,62
Indonesia	32,88	21,84	45,28	31,74	21,05	47,21	31,90	21,41	46,69

**Lampiran 12. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk
Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2015–2016**

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	512	530	482	26,03	25,80	23,10	54,56	58,56	57,34
Sumatera Utara	1 370	1 228	1 245	22,98	19,92	20,78	56,85	58,04	54,24
Sumatera Barat	491	559	510	22,48	23,02	21,72	56,29	57,52	58,48
Riau	639	740	652	25,00	26,41	23,59	44,61	52,24	50,01
Jambi	501	500	450	32,31	30,90	27,72	45,07	49,67	47,75
Sumatera Selatan	1 024	992	947	27,69	25,48	23,69	53,80	54,32	54,75
Bengkulu	229	231	197	25,27	24,02	20,41	55,52	56,09	63,67
Lampung	1 082	1 054	998	29,77	27,33	25,38	46,56	52,70	53,47
Kep. Bangka Belitung	116	122	114	18,52	18,98	16,58	59,58	55,69	64,57
Kepulauan Riau	90	107	113	10,74	12,86	13,18	54,43	56,77	61,25
DKI Jakarta	387	395	453	8,18	7,90	9,32	62,15	68,62	68,15
Jawa Barat	2 792	3 079	2 575	14,86	15,19	13,41	51,64	56,00	54,85
Jawa Tengah	3 443	3 736	3 198	20,95	21,77	19,37	59,66	60,28	62,71
DI Yogyakarta	352	415	447	18,64	20,38	21,88	58,63	61,94	60,45
Jawa Timur	4 615	4 662	4 262	23,83	23,72	22,30	59,28	58,61	60,49
Banten	573	682	538	11,88	13,03	10,57	56,87	60,01	62,22
Bali	418	852	426	17,97	36,54	17,62	61,23	49,89	57,21
Nusa Tenggara Barat	439	566	481	20,63	24,65	20,32	59,28	59,19	67,05
Nusa Tenggara Timur	852	657	735	38,40	27,88	32,27	55,64	59,30	55,98
Kalimantan Barat	593	701	542	26,53	30,39	23,71	56,40	52,00	60,00
Kalimantan Tengah	283	248	282	23,31	20,01	22,62	53,58	57,36	57,51
Kalimantan Selatan	512	511	435	27,10	25,85	22,12	55,50	59,48	54,88
Kalimantan Timur	207	229	249	14,54	15,21	15,77	47,99	51,38	49,22
Kalimantan Utara	42	30	28	15,55	11,00	10,10	45,91	39,87	46,86
Sulawesi Utara	169	186	195	16,88	17,05	17,55	44,25	48,03	52,35
Sulawesi Tengah	343	365	328	25,83	25,26	22,48	50,23	57,52	57,41
Sulawesi Selatan	969	1 034	986	27,80	28,86	26,70	48,94	51,95	54,10
Sulawesi Tenggara	309	351	294	28,76	30,06	24,11	57,75	58,25	62,31
Gorontalo	100	91	97	20,20	16,74	17,82	51,81	70,33	62,43
Sulawesi Barat	234	213	202	39,29	34,05	32,33	50,35	53,90	54,40
Maluku	145	142	162	22,11	20,82	23,52	61,90	59,15	58,73
Maluku Utara	123	121	109	25,53	23,66	21,70	54,32	57,47	58,51
Papua Barat	80	97	92	20,91	23,53	22,79	51,24	56,90	52,56
Papua	542	446	431	32,38	26,37	25,90	51,56	52,76	48,79
Indonesia	24 574	25 870	23 258	21,40	21,44	19,64	55,24	56,94	57,86

Lampiran 13. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, 2015–2016

Kelompok Umur	2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,72	2,16	1,87	
1–14 jam	5,63	7,08	5,69	
15–24 jam	11,37	10,86	9,94	
25–34 jam	12,89	12,18	11,59	
35–39 jam	9,86	9,24	9,46	
40–48 jam	32,22	30,39	31,38	
49–59 jam	14,81	15,32	16,50	
60 jam ke atas	11,51	12,78	13,57	
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,85	2,14	1,93	
1–14 jam	3,43	4,48	3,63	
15–24 jam	8,72	8,43	7,42	
25–34 jam	11,53	10,91	10,01	
35–39 jam	9,32	8,68	8,69	
40–48 jam	36,24	34,49	34,83	
49–59 jam	17,11	17,73	19,21	
60 jam ke atas	11,80	13,14	14,29	
Perempuan	100,00	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,50	2,20	1,79	
1–14 jam	9,36	11,16	8,99	
15–24 jam	15,85	14,66	14,00	
25–34 jam	15,17	14,16	14,11	
35–39 jam	10,79	10,12	10,70	
40–48 jam	25,41	23,95	25,83	
49–59 jam	10,92	11,55	12,16	
60 jam ke atas	11,01	12,20	12,41	
Perkotaan	100,00	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,41	2,10	1,74	
1–14 jam	3,66	5,13	4,14	
15–24 jam	6,94	7,62	6,83	
25–34 jam	8,60	8,62	8,33	
35–39 jam	8,57	7,85	8,05	
40–48 jam	40,31	36,95	37,37	
49–59 jam	15,61	15,73	16,88	
60 jam ke atas	14,90	16,00	16,66	
Perdesaan	100,00	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,05	2,22	2,02	
1–14 jam	7,73	9,22	7,36	
15–24 jam	16,10	14,41	13,31	
25–34 jam	17,46	16,08	15,10	
35–39 jam	11,25	10,77	10,98	
40–48 jam	23,57	23,19	24,91	
49–59 jam	13,96	14,88	16,10	
60 jam ke atas	7,88	9,23	10,23	

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 14. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2015–2016

Provinsi	0 jam*			1–14 jam			15–24 jam		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,66	2,29	1,49	6,65	9,15	7,15	16,28	14,26	12,37
Sumatera Utara	1,24	1,88	2,22	5,21	5,92	5,36	13,09	10,34	11,98
Sumatera Barat	2,36	2,56	2,48	6,77	9,30	7,85	12,59	13,74	11,49
Riau	1,82	2,09	1,96	6,73	9,38	9,23	14,45	13,56	13,92
Jambi	1,79	2,43	1,69	5,32	7,41	6,05	16,86	16,93	14,30
Sumatera Selatan	2,44	1,93	1,89	4,42	6,54	5,06	15,55	14,74	11,56
Bengkulu	2,93	2,57	1,51	5,64	8,09	6,42	15,60	11,68	12,04
Lampung	2,37	1,65	1,89	7,37	8,56	5,96	15,25	13,74	12,08
Kep. Bangka Belitung	1,61	4,02	1,74	3,47	7,14	5,30	10,13	9,06	9,08
Kepulauan Riau	1,58	1,21	1,13	2,03	2,87	2,31	5,81	6,62	5,37
DKI Jakarta	0,86	1,11	0,59	2,52	3,18	2,80	3,51	3,11	4,64
Jawa Barat	1,46	2,09	1,52	4,20	5,59	3,96	8,86	8,89	7,45
Jawa Tengah	2,12	2,69	1,93	5,56	7,35	5,10	10,36	10,00	9,48
DI Yogyakarta	1,12	2,87	2,63	5,99	7,09	8,35	8,07	8,56	8,95
Jawa Timur	1,24	1,57	1,56	6,74	7,88	6,20	12,22	11,86	10,80
Banten	1,38	0,78	1,56	3,24	4,60	3,52	6,70	7,60	6,99
Bali	1,70	3,91	1,77	3,82	12,53	5,05	6,98	15,04	7,27
Nusa Tenggara Barat	3,13	2,53	2,20	8,33	11,42	7,80	14,82	15,47	12,23
Nusa Tenggara Timur	2,16	2,27	3,16	11,05	7,56	10,42	20,31	13,43	16,53
Kalimantan Barat	0,84	1,72	1,29	4,91	6,84	4,93	14,75	15,62	12,62
Kalimantan Tengah	1,81	2,43	1,83	5,93	6,68	7,53	12,23	11,11	10,96
Kalimantan Selatan	2,79	2,46	2,64	7,42	6,73	7,07	12,74	12,78	10,04
Kalimantan Timur	1,38	1,66	2,81	2,79	4,43	4,51	6,78	7,00	6,77
Kalimantan Utara	1,99	4,25	2,63	2,57	3,94	1,61	6,70	5,88	6,10
Sulawesi Utara	1,85	2,98	2,47	4,05	5,21	6,68	10,68	10,35	8,97
Sulawesi Tengah	3,05	4,60	3,00	7,79	10,46	7,57	13,78	12,26	10,92
Sulawesi Selatan	2,58	2,88	3,23	9,28	9,95	9,14	14,03	12,22	11,23
Sulawesi Tenggara	2,49	2,13	3,14	9,17	10,90	9,37	13,66	13,92	12,83
Gorontalo	2,76	3,96	2,70	5,94	6,31	8,56	10,91	9,42	7,69
Sulawesi Barat	3,86	5,98	3,25	15,93	14,78	14,30	19,41	14,25	13,41
Maluku	1,66	5,34	3,95	4,44	7,63	7,28	13,08	11,22	12,59
Maluku Utara	1,79	2,73	2,99	7,48	9,58	7,13	15,41	12,52	8,52
Papua Barat	2,66	5,07	4,10	3,39	4,80	3,73	12,17	8,00	11,08
Papua	0,78	1,25	0,81	3,37	2,07	3,72	13,64	10,42	12,40
Indonesia	1,72	2,16	1,87	5,63	7,08	5,69	11,37	10,86	9,94

Lanjutan Lampiran 14

Provinsi	25–34 jam			35–39 jam			40–48 jam		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)
Aceh	17,96	15,83	15,15	13,60	10,68	11,59	23,74	23,59	25,85
Sumatera Utara	14,82	12,83	13,89	11,58	11,29	11,08	30,82	31,30	28,82
Sumatera Barat	14,53	12,96	13,15	10,61	7,85	10,96	26,29	24,69	26,79
Riau	13,63	15,01	12,81	9,86	9,30	9,54	26,81	26,47	25,76
Jambi	20,19	19,47	16,40	12,72	11,47	13,45	24,62	24,25	26,11
Sumatera Selatan	18,16	14,76	16,72	11,56	9,84	11,88	27,04	26,42	25,25
Bengkulu	17,05	15,82	12,31	13,01	10,15	12,74	24,92	24,75	24,21
Lampung	15,33	14,65	14,53	10,76	9,11	10,35	25,03	25,21	23,49
Kep. Bangka Belitung	13,47	11,80	9,33	10,45	8,21	10,60	36,44	34,81	35,36
Kepulauan Riau	6,43	7,62	8,35	7,22	6,76	11,19	43,73	43,94	38,60
DKI Jakarta	4,60	3,87	4,21	5,59	4,55	4,12	48,96	47,78	46,64
Jawa Barat	10,11	9,21	8,18	8,26	7,04	7,45	38,90	35,10	39,44
Jawa Tengah	11,55	11,60	10,98	9,22	9,23	9,43	32,66	30,10	32,93
DI Yogyakarta	8,78	9,24	9,78	9,05	10,49	8,45	36,97	33,31	31,32
Jawa Timur	13,29	12,19	12,31	9,13	9,58	9,03	30,17	28,48	29,43
Banten	8,43	8,61	7,90	7,79	6,96	7,81	47,26	44,04	43,18
Bali	9,81	14,04	8,90	8,31	7,61	8,14	31,64	24,45	27,68
Nusa Tenggara Barat	15,81	14,63	14,16	10,54	10,39	12,20	22,15	22,33	23,24
Nusa Tenggara Timur	19,90	19,43	16,44	12,87	14,04	11,05	20,88	26,13	24,39
Kalimantan Barat	17,26	17,59	14,13	11,95	9,80	10,74	30,09	26,96	29,30
Kalimantan Tengah	14,47	12,71	13,08	11,79	11,72	9,42	28,12	26,86	22,83
Kalimantan Selatan	15,21	15,59	13,35	11,78	12,44	9,92	25,46	24,88	27,04
Kalimantan Timur	10,87	10,45	11,18	10,37	9,55	9,67	33,43	25,41	25,85
Kalimantan Utara	11,73	7,20	6,71	14,98	8,97	13,73	28,21	19,42	22,75
Sulawesi Utara	11,45	12,01	9,80	10,61	10,32	10,07	38,23	34,35	34,34
Sulawesi Tengah	15,51	14,25	13,87	11,52	12,20	11,97	24,23	23,53	23,63
Sulawesi Selatan	14,17	15,14	14,15	11,39	10,49	10,25	24,81	24,07	22,11
Sulawesi Tenggara	16,36	13,47	11,11	10,60	7,12	9,35	21,04	22,45	22,47
Gorontalo	11,57	9,98	9,40	11,69	8,13	7,57	21,24	26,39	23,41
Sulawesi Barat	16,77	15,21	13,88	10,34	9,68	12,25	17,28	16,25	18,27
Maluku	15,63	13,09	14,59	12,78	11,36	12,15	26,13	22,61	24,16
Maluku Utara	17,98	12,93	13,29	14,25	12,79	10,91	23,41	22,05	25,37
Papua Barat	17,31	18,60	19,45	13,00	9,20	12,01	27,90	24,39	24,42
Papua	27,05	24,77	22,85	21,67	23,01	19,64	23,55	24,02	27,34
Indonesia	12,89	12,18	11,59	9,86	9,24	9,46	32,22	30,39	31,38

Lanjutan Lampiran 14

Provinsi	49–59 jam			60 jam ke atas		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	12,24	14,36	14,78	7,87	9,85	11,61
Sumatera Utara	11,68	14,07	14,60	11,56	12,37	12,04
Sumatera Barat	15,15	15,87	14,84	11,69	13,04	12,44
Riau	13,99	13,20	13,30	12,72	10,98	13,48
Jambi	11,72	11,67	12,34	6,78	6,37	9,66
Sumatera Selatan	12,37	14,29	14,78	8,47	11,48	12,87
Bengkulu	13,12	16,30	18,26	7,72	10,64	12,51
Lampung	17,11	17,72	19,18	6,78	9,35	12,51
Kep. Bangka Belitung	15,42	15,85	18,82	9,01	9,12	9,77
Kepulauan Riau	19,12	18,60	19,23	14,09	12,37	13,82
DKI Jakarta	13,32	15,68	15,86	20,63	20,71	21,14
Jawa Barat	14,45	15,80	16,46	13,77	16,29	15,53
Jawa Tengah	17,75	17,85	18,35	10,78	11,20	11,80
DI Yogyakarta	18,99	16,95	16,57	11,03	11,49	13,94
Jawa Timur	15,89	15,92	17,53	11,33	12,51	13,14
Banten	12,68	13,61	15,07	12,52	13,78	13,97
Bali	22,95	11,95	21,56	14,79	10,46	19,63
Nusa Tenggara Barat	15,80	14,67	17,98	9,42	8,56	10,19
Nusa Tenggara Timur	7,10	9,52	10,40	5,74	7,62	7,61
Kalimantan Barat	12,02	12,58	14,63	8,18	8,89	12,35
Kalimantan Tengah	14,17	14,74	17,41	11,47	13,75	16,93
Kalimantan Selatan	14,77	14,49	16,99	9,83	10,64	12,95
Kalimantan Timur	17,04	18,34	19,40	17,35	23,16	19,82
Kalimantan Utara	17,41	23,17	17,69	16,40	27,17	28,78
Sulawesi Utara	11,15	13,12	13,20	11,97	11,65	14,46
Sulawesi Tengah	14,30	12,42	16,63	9,82	10,28	12,41
Sulawesi Selatan	14,19	13,60	16,85	9,55	11,64	13,05
Sulawesi Tenggara	16,24	16,63	18,05	10,44	13,38	13,69
Gorontalo	18,30	20,50	21,15	17,58	15,31	19,53
Sulawesi Barat	11,05	12,52	16,71	5,36	11,33	7,94
Maluku	12,99	15,98	14,17	13,30	12,76	11,11
Maluku Utara	11,65	16,07	17,53	8,03	11,33	14,28
Papua Barat	11,75	12,50	13,17	11,81	17,46	12,04
Papua	5,02	6,93	5,54	4,92	7,53	7,70
Indonesia	14,81	15,32	16,50	11,51	12,78	13,57

Lampiran 15. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal/Informal, 2015–2016

Provinsi	Formal			Informal		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	43,26	47,33	48,17	56,74	52,67	51,83
Sumatera Utara	44,65	47,96	43,83	55,35	52,04	56,17
Sumatera Barat	42,28	43,04	44,67	57,72	56,96	55,33
Riau	56,07	53,02	51,44	43,93	46,98	48,56
Jambi	45,47	47,68	44,09	54,53	52,32	55,91
Sumatera Selatan	42,67	40,20	45,54	57,33	59,80	54,46
Bengkulu	35,46	44,04	41,51	64,54	55,96	58,49
Lampung	35,10	37,47	36,82	64,90	62,53	63,18
Kep. Bangka Belitung	51,27	56,57	51,86	48,73	43,43	48,14
Kepulauan Riau	75,77	73,48	71,76	24,23	26,52	28,24
DKI Jakarta	78,51	77,31	76,44	21,49	22,69	23,56
Jawa Barat	56,20	57,01	57,85	43,80	42,99	42,15
Jawa Tengah	45,93	45,95	45,77	54,07	54,05	54,23
DI Yogyakarta	55,08	51,70	54,14	44,92	48,30	45,86
Jawa Timur	43,59	44,69	44,98	56,41	55,31	55,02
Banten	66,54	68,16	66,74	33,46	31,84	33,26
Bali	55,92	57,25	56,57	44,08	42,75	43,43
Nusa Tenggara Barat	34,33	32,88	35,12	65,67	67,12	64,88
Nusa Tenggara Timur	25,30	26,88	31,01	74,70	73,12	68,99
Kalimantan Barat	37,82	42,10	43,00	62,18	57,90	57,00
Kalimantan Tengah	50,74	49,91	49,38	49,26	50,09	50,62
Kalimantan Selatan	48,01	44,80	46,18	51,99	55,20	53,82
Kalimantan Timur	65,23	63,64	62,78	34,77	36,36	37,22
Kalimantan Utara	60,86	60,29	59,38	39,14	39,71	40,62
Sulawesi Utara	45,10	48,41	44,01	54,90	51,59	55,99
Sulawesi Tengah	39,28	37,59	41,32	60,72	62,41	58,68
Sulawesi Selatan	42,75	44,08	43,10	57,25	55,92	56,90
Sulawesi Tenggara	36,62	44,73	40,07	63,38	55,27	59,93
Gorontalo	42,52	46,27	46,64	57,48	53,73	53,36
Sulawesi Barat	31,22	37,30	36,35	68,78	62,70	63,65
Maluku	36,45	40,01	41,25	63,55	59,99	58,75
Maluku Utara	36,15	40,20	43,27	63,85	59,80	56,73
Papua Barat	44,37	46,87	45,90	55,63	53,13	54,10
Papua	20,04	25,10	24,77	79,96	74,90	75,23
Indonesia	48,28	49,26	49,20	51,72	50,74	50,80

Lampiran 16. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2015–2016

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	8,44	12,49	9,93	7,31	9,53	8,13	7,05	8,44	7,57
Sumatera Utara	6,08	7,67	6,71	5,73	7,61	6,49	5,39	6,50	5,84
Sumatera Barat	6,68	7,21	6,89	5,73	5,92	5,81	4,93	5,32	5,09
Riau	6,15	11,36	7,83	4,99	7,69	5,94	6,92	8,41	7,43
Jambi	4,00	4,98	4,34	4,14	5,58	4,66	3,86	4,26	4,00
Sumatera Selatan	5,88	6,39	6,07	4,78	2,51	3,94	4,39	4,19	4,31
Bengkulu	4,44	5,65	4,91	3,17	4,80	3,84	3,32	3,27	3,30
Lampung	4,37	6,68	5,14	4,15	5,25	4,54	4,48	4,86	4,62
Kep. Bangka Belitung	5,27	8,31	6,29	5,24	7,83	6,17	2,36	3,01	2,60
Kepulauan Riau	6,10	6,41	6,20	10,06	6,79	9,03	7,54	7,97	7,69
DKI Jakarta	7,57	6,67	7,23	6,80	4,20	5,77	6,48	5,53	6,12
Jawa Barat	8,39	9,42	8,72	8,83	8,07	8,57	9,37	7,92	8,89
Jawa Tengah	5,56	4,16	4,99	4,73	3,47	4,20	5,12	3,92	4,63
DI Yogyakarta	3,72	4,54	4,07	3,56	1,90	2,81	3,68	1,50	2,72
Jawa Timur	4,48	4,46	4,47	3,80	4,65	4,14	3,59	5,12	4,21
Banten	9,37	9,92	9,55	8,60	6,79	7,95	9,03	8,72	8,92
Bali	2,22	1,70	1,99	3,24	0,67	2,12	2,17	1,55	1,89
Nusa Tenggara Barat	6,73	4,24	5,69	4,26	2,92	3,66	4,55	3,20	3,94
Nusa Tenggara Timur	3,19	4,68	3,83	3,37	3,85	3,59	2,88	3,73	3,25
Kalimantan Barat	5,62	4,40	5,15	4,48	4,74	4,58	4,43	3,90	4,23
Kalimantan Tengah	4,28	5,01	4,54	2,75	5,37	3,67	4,86	4,76	4,82
Kalimantan Selatan	4,93	4,90	4,92	4,04	2,98	3,63	5,01	6,12	5,45
Kalimantan Timur	6,86	9,07	7,50	9,75	7,03	8,86	8,34	7,18	7,95
Kalimantan Utara	5,31	6,56	5,68	3,83	4,16	3,92	5,42	4,76	5,23
Sulawesi Utara	7,13	13,02	9,03	5,86	11,54	7,82	3,91	10,20	6,18
Sulawesi Tengah	3,41	5,36	4,10	2,53	4,89	3,46	2,33	4,81	3,29
Sulawesi Selatan	5,57	6,58	5,95	5,33	4,75	5,11	4,36	5,48	4,80
Sulawesi Tenggara	4,27	7,49	5,55	3,47	4,21	3,78	2,81	2,59	2,72
Gorontalo	3,99	5,82	4,65	3,54	4,41	3,88	2,20	3,62	2,76
Sulawesi Barat	2,24	5,07	3,35	2,66	2,80	2,72	2,81	4,14	3,33
Maluku	8,18	12,61	9,93	6,31	7,97	6,98	7,07	7,01	7,05
Maluku Utara	4,89	8,13	6,05	1,73	6,28	3,43	3,00	5,80	4,01
Papua Barat	6,71	10,42	8,08	5,77	5,67	5,73	7,12	8,11	7,46
Papua	4,24	3,63	3,99	3,34	2,43	2,97	3,64	2,92	3,35
Indonesia	6,07	6,37	6,18	5,66	5,26	5,50	5,70	5,45	5,61

Lampiran 17. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), 2015–2016

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,63	5,16	3,05	17,32	12,75	13,22	10,99	8,48	9,25
Sumatera Utara	3,51	5,24	3,80	10,14	7,58	8,15	9,93	8,71	7,89
Sumatera Barat	3,25	4,08	3,22	12,63	6,43	7,89	8,99	11,22	6,04
Riau	5,47	4,00	3,74	11,14	7,92	12,93	9,51	9,48	7,75
Jambi	1,88	1,05	2,61	9,07	10,68	6,80	7,20	7,56	4,45
Sumatera Selatan	3,46	2,70	2,99	12,46	6,89	7,96	6,35	4,44	2,99
Bengkulu	2,30	2,73	2,45	8,28	4,09	5,01	9,72	7,45	3,09
Lampung	2,72	3,31	3,19	11,15	6,81	8,57	6,90	7,71	4,79
Kep. Bangka Belitung	3,98	4,60	1,64	11,10	8,86	3,56	6,92	6,98	5,61
Kepulauan Riau	4,84	5,24	5,86	7,82	14,32	11,14	4,73	2,36	2,59
DKI Jakarta	4,80	3,86	3,26	10,00	8,22	9,85	5,46	3,75	2,97
Jawa Barat	6,70	7,35	7,31	14,07	11,17	13,47	5,99	8,37	5,66
Jawa Tengah	3,10	3,35	2,84	10,64	6,83	10,40	6,06	4,75	3,96
DI Yogyakarta	2,15	1,45	1,80	6,21	3,44	3,92	5,26	5,56	2,83
Jawa Timur	2,23	2,84	2,42	9,94	6,78	8,20	5,58	6,38	4,68
Banten	8,50	7,99	8,50	13,00	9,62	12,34	4,92	4,09	3,61
Bali	0,82	1,80	0,41	3,15	2,81	2,89	3,79	1,89	4,38
Nusa Tenggara Barat	3,93	3,32	2,22	9,47	5,00	8,07	7,88	2,93	3,96
Nusa Tenggara Timur	1,48	1,48	1,40	9,74	7,95	6,50	9,64	10,10	8,32
Kalimantan Barat	3,54	3,48	2,82	9,58	7,29	8,03	7,00	6,21	5,70
Kalimantan Tengah	3,05	3,61	2,67	8,50	3,92	9,17	4,53	3,55	7,49
Kalimantan Selatan	3,28	2,56	4,60	8,46	5,83	7,73	6,86	5,24	5,43
Kalimantan Timur	5,83	7,77	5,42	10,59	10,46	11,51	3,83	8,47	6,33
Kalimantan Utara	3,84	4,17	2,99	9,12	4,80	8,21	4,60	0,00	7,42
Sulawesi Utara	4,90	4,89	3,59	15,48	11,22	10,67	8,73	10,98	5,49
Sulawesi Tengah	2,35	2,10	2,06	8,50	5,69	5,36	4,09	6,20	5,29
Sulawesi Selatan	2,40	3,81	3,04	12,04	7,78	7,42	9,19	5,81	7,36
Sulawesi Tenggara	2,60	1,67	1,08	10,45	4,64	4,86	8,50	8,31	4,37
Gorontalo	1,81	2,09	1,59	12,73	4,98	5,52	5,51	11,67	3,49
Sulawesi Barat	1,96	1,06	3,03	6,30	7,26	3,82	6,65	4,54	4,36
Maluku	2,99	4,78	2,60	18,11	9,44	12,71	14,92	8,45	6,75
Maluku Utara	2,64	0,95	1,36	11,05	5,08	5,61	9,39	8,78	10,39
Papua Barat	2,17	2,89	4,21	16,44	8,14	13,18	10,95	10,40	6,01
Papua	1,81	1,73	1,45	11,34	5,80	8,16	7,85	5,46	5,99
Indonesia	3,77	4,13	3,74	11,16	8,05	9,63	6,68	6,46	5,15

Lampiran 18. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2015–2016

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	23,68	32,61	19,50	60,02	50,09	58,01	16,30	17,30	22,48
Sumatera Utara	26,86	41,88	34,05	56,82	43,82	50,59	16,31	14,30	15,36
Sumatera Barat	26,56	39,10	34,27	56,67	33,15	48,00	16,77	27,75	17,72
Riau	38,31	37,23	26,76	47,12	43,82	60,81	14,57	18,95	12,43
Jambi	27,19	13,01	39,45	54,93	64,32	48,11	17,89	22,67	12,43
Sumatera Selatan	37,02	45,08	43,14	53,58	45,79	48,98	9,40	9,14	7,88
Bengkulu	27,75	40,26	40,98	47,59	30,15	44,43	24,66	29,59	14,58
Lampung	36,10	48,59	46,79	55,06	38,04	44,95	8,84	13,38	8,26
Kep. Bangka Belitung	38,94	43,18	38,84	50,06	43,12	37,68	11,00	13,70	23,47
Kepulauan Riau	30,16	23,62	30,75	58,42	72,92	64,03	11,42	3,46	5,21
DKI Jakarta	21,26	21,13	17,03	60,35	63,15	71,56	18,39	15,72	11,41
Jawa Barat	46,40	51,81	47,85	45,94	37,78	44,04	7,66	10,41	8,11
Jawa Tengah	43,63	56,13	42,74	46,91	34,49	50,65	9,46	9,39	6,62
DI Yogyakarta	25,86	24,08	31,95	54,28	47,46	51,34	19,86	28,46	16,71
Jawa Timur	33,01	45,12	36,26	56,27	41,27	52,83	10,72	13,60	10,91
Banten	46,31	50,85	48,55	46,62	41,28	44,68	7,07	7,87	6,77
Bali	22,22	44,53	10,75	50,47	39,80	52,86	27,31	15,66	36,39
Nusa Tenggara Barat	44,75	60,10	34,78	39,22	30,88	52,35	16,03	9,02	12,87
Nusa Tenggara Timur	27,60	29,26	29,09	48,45	43,65	40,68	23,95	27,09	30,23
Kalimantan Barat	48,21	51,83	45,97	41,27	35,21	41,44	10,52	12,95	12,60
Kalimantan Tengah	43,84	64,54	35,44	45,98	24,42	46,35	10,17	11,04	18,21
Kalimantan Selatan	43,26	46,39	54,10	41,08	38,83	33,88	15,66	14,78	12,02
Kalimantan Timur	34,61	42,46	31,42	58,09	43,29	57,14	7,30	14,24	11,45
Kalimantan Utara	35,51	62,91	31,27	52,58	37,09	46,49	11,91	0,00	22,25
Sulawesi Utara	28,74	33,15	31,46	59,00	47,00	57,22	12,26	19,85	11,31
Sulawesi Tengah	36,52	38,75	39,14	52,56	41,78	40,81	10,92	19,47	20,05
Sulawesi Selatan	23,62	44,09	37,74	51,90	37,57	39,19	24,48	18,34	23,07
Sulawesi Tenggara	27,60	23,40	21,59	50,05	33,84	52,43	22,35	42,76	25,98
Gorontalo	25,95	34,59	36,19	60,99	31,81	45,92	13,06	33,60	17,90
Sulawesi Barat	40,45	27,00	63,12	38,43	57,18	23,02	21,12	15,82	13,86
Maluku	15,39	34,03	17,53	63,68	47,61	68,58	20,94	18,36	13,89
Maluku Utara	24,86	14,80	18,24	55,42	46,79	43,88	19,71	38,41	37,89
Papua Barat	14,11	26,66	27,81	64,68	44,07	57,64	21,21	29,27	14,55
Papua	33,93	40,08	29,88	53,11	45,79	54,29	12,96	14,13	15,83
Indonesia	37,11	45,34	39,44	50,92	41,22	49,36	11,97	13,45	11,19

Lampiran 19. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2015–2016

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	53,54	47,87	50,95	34,73	37,02	32,45	11,73	15,10	16,60
Sumatera Utara	54,15	56,19	52,21	37,65	32,51	36,83	8,20	11,30	10,96
Sumatera Barat	64,47	59,78	59,83	26,95	25,60	27,73	8,58	14,62	12,44
Riau	66,30	61,61	61,63	27,42	30,42	32,54	6,28	7,96	5,83
Jambi	68,12	62,35	61,12	25,06	21,84	25,38	6,81	15,81	13,50
Sumatera Selatan	69,00	64,15	67,94	24,29	29,45	24,29	6,71	6,40	7,77
Bengkulu	61,17	48,16	50,74	31,97	36,69	31,13	6,87	15,14	18,13
Lampung	70,58	72,77	63,97	24,55	20,75	30,78	4,87	6,48	5,25
Kep. Bangka Belitung	70,12	57,94	66,77	26,37	32,77	28,17	3,51	9,29	5,05
Kepulauan Riau	57,04	46,68	39,42	39,72	28,62	34,03	3,24	24,70	26,55
DKI Jakarta	36,87	48,38	35,42	41,03	29,50	26,91	22,09	22,12	37,68
Jawa Barat	79,71	74,05	76,80	13,55	19,00	15,02	6,74	6,95	8,18
Jawa Tengah	79,49	78,16	77,49	15,12	16,60	18,61	5,38	5,24	3,90
DI Yogyakarta	48,38	59,91	52,77	32,07	30,74	28,42	19,55	9,35	18,80
Jawa Timur	76,83	76,93	68,33	17,12	18,92	24,47	6,05	4,16	7,20
Banten	77,79	77,70	76,86	15,71	16,01	18,40	6,50	6,29	4,74
Bali	60,51	53,53	47,93	29,97	31,19	43,63	9,53	15,28	8,43
Nusa Tenggara Barat	70,66	71,84	64,76	19,19	19,79	26,34	10,14	8,37	8,90
Nusa Tenggara Timur	71,63	72,13	63,58	22,47	21,37	24,33	5,90	6,50	12,08
Kalimantan Barat	78,06	73,00	65,99	17,10	19,79	26,12	4,83	7,20	7,89
Kalimantan Tengah	70,29	71,28	62,29	24,29	18,57	30,58	5,43	10,15	7,13
Kalimantan Selatan	70,55	69,09	68,54	22,96	21,61	23,47	6,49	9,30	7,99
Kalimantan Timur	61,88	51,31	54,42	29,15	37,51	33,48	8,97	11,18	12,09
Kalimantan Utara	60,54	57,81	51,86	34,33	28,85	42,32	5,13	13,34	5,82
Sulawesi Utara	62,27	57,63	56,35	32,68	25,32	36,24	5,04	17,05	7,41
Sulawesi Tengah	66,66	67,56	62,63	24,00	25,74	28,69	9,34	6,70	8,68
Sulawesi Selatan	62,01	61,13	52,48	24,58	27,64	32,40	13,40	11,22	15,12
Sulawesi Tenggara	54,20	53,64	48,58	32,45	28,96	33,23	13,36	17,40	18,19
Gorontalo	72,73	70,84	66,47	20,59	20,73	27,81	6,68	8,43	5,72
Sulawesi Barat	60,44	74,49	67,48	27,54	19,15	22,40	12,02	6,36	10,12
Maluku	56,32	54,35	48,68	36,98	29,74	36,74	6,70	15,90	14,58
Maluku Utara	63,13	54,65	48,10	30,18	29,97	40,49	6,69	15,39	11,41
Papua Barat	59,95	65,56	64,68	26,62	31,53	24,63	13,43	2,91	10,69
Papua	83,87	82,01	81,53	14,24	15,56	15,72	1,88	2,42	2,75
Indonesia	71,08	69,37	65,94	21,59	22,52	25,14	7,33	8,11	8,92

**Lampiran 20. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk
Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2015–2016**

Provinsi	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 258	1 244	1 256
Sumatera Utara	3 108	2 981	3 279
Sumatera Barat	1 288	1 087	1 214
Riau	1 612	1 467	1 522
Jambi	830	779	813
Sumatera Selatan	1 807	1 736	1 659
Bengkulu	395	359	375
Lampung	2 010	1 846	1 800
Kep. Bangka Belitung	332	323	318
Kepulauan Riau	479	479	481
DKI Jakarta	2 578	2 409	2 561
Jawa Barat	13 531	12 245	13 671
Jawa Tengah	8 194	7 719	8 470
DI Yogyakarta	912	807	818
Jawa Timur	9 610	9 528	10 215
Banten	3 237	2 988	3 189
Bali	769	782	726
Nusa Tenggara Barat	1 134	1 035	979
Nusa Tenggara Timur	1 025	922	1 048
Kalimantan Barat	1 026	999	1 057
Kalimantan Tengah	517	526	528
Kalimantan Selatan	863	826	825
Kalimantan Timur	928	848	816
Kalimantan Utara	163	169	174
Sulawesi Utara	694	622	634
Sulawesi Tengah	666	575	579
Sulawesi Selatan	2 376	2 349	2 287
Sulawesi Tenggara	527	473	453
Gorontalo	296	258	266
Sulawesi Barat	261	246	252
Maluku	401	407	409
Maluku Utara	260	252	268
Papua Barat	189	174	186
Papua	447	470	523
Indonesia	63 721	59 929	63 653

Lampiran 21. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2015–2016

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	18,90	53,81	36,56	18,38	52,74	35,76	18,38	52,73	35,74
Sumatera Utara	17,62	47,42	32,72	17,17	44,73	31,13	20,56	47,12	34,01
Sumatera Barat	20,37	50,03	35,44	18,45	40,51	29,66	18,90	46,52	32,92
Riau	16,80	57,92	36,78	15,54	51,47	32,99	15,35	53,20	33,75
Jambi	15,35	53,23	33,86	14,87	48,83	31,47	14,35	51,40	32,46
Sumatera Selatan	16,11	47,24	31,47	13,35	47,08	29,99	14,87	42,33	28,41
Bengkulu	14,98	44,22	29,33	14,65	38,60	26,41	14,98	40,09	27,31
Lampung	14,44	55,43	34,40	13,84	49,83	31,37	13,82	47,83	30,39
Kep. Bangka Belitung	15,38	52,90	33,29	16,24	49,13	31,94	16,51	47,02	31,07
Kepulauan Riau	13,37	57,42	34,93	11,78	58,02	34,42	15,37	53,55	34,07
DKI Jakarta	17,42	49,78	33,61	16,97	45,42	31,21	16,69	49,42	33,09
Jawa Barat	18,49	61,26	39,66	16,36	55,17	35,57	19,38	59,70	39,35
Jawa Tengah	17,62	46,11	32,14	17,39	42,35	30,11	19,13	46,06	32,85
DI Yogyakarta	20,05	42,70	31,62	18,67	36,55	27,80	17,76	37,90	28,04
Jawa Timur	16,01	47,57	32,16	16,62	46,15	31,73	19,11	47,94	33,86
Banten	17,94	58,33	37,76	17,48	52,05	34,44	18,62	54,71	36,34
Bali	16,23	32,76	24,49	15,22	34,22	24,72	16,10	29,44	22,76
Nusa Tenggara Barat	18,41	47,02	33,46	18,78	40,66	30,29	17,82	38,01	28,43
Nusa Tenggara Timur	19,42	41,57	30,75	18,77	35,59	27,37	20,32	40,85	30,82
Kalimantan Barat	16,08	45,07	30,32	15,37	43,63	29,25	15,81	46,07	30,68
Kalimantan Tengah	13,10	46,45	28,89	12,82	47,06	29,03	12,80	46,39	28,70
Kalimantan Selatan	14,71	46,13	30,27	14,28	43,41	28,70	14,68	42,46	28,43
Kalimantan Timur	16,36	61,44	37,61	15,83	54,26	33,94	14,28	52,31	32,21
Kalimantan Utara	17,10	59,25	36,55	13,87	64,08	37,04	16,88	61,43	37,60
Sulawesi Utara	18,46	59,74	38,72	15,75	53,86	34,45	18,30	52,13	34,89
Sulawesi Tengah	14,62	51,11	32,49	13,96	42,21	27,80	13,19	42,84	27,72
Sulawesi Selatan	20,99	55,69	39,06	20,59	54,71	38,36	20,31	52,53	37,08
Sulawesi Tenggara	17,08	46,07	31,65	15,97	40,07	28,08	14,38	38,58	26,53
Gorontalo	18,27	54,20	36,35	15,42	47,17	31,40	17,09	46,88	32,11
Sulawesi Barat	14,06	45,20	29,73	14,36	40,87	27,70	11,34	44,66	28,10
Maluku	21,84	49,23	35,53	22,75	48,60	35,67	22,96	48,03	35,49
Maluku Utara	16,42	51,44	33,57	16,65	48,34	32,17	17,20	51,12	33,81
Papua Barat	18,75	45,69	31,32	16,29	42,46	28,50	14,51	47,60	29,95
Papua	12,34	29,67	20,43	12,13	31,62	21,23	14,15	33,75	23,30
Indonesia	17,29	51,13	34,24	16,54	47,29	31,94	18,03	49,23	33,66

Lampiran 22. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2015–2016

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	50,85	51,45	48,40	34,41	31,95	33,20	14,73	16,60	18,40
Sumatera Utara	51,40	51,83	52,35	37,59	37,52	36,28	11,02	10,66	11,38
Sumatera Barat	56,27	55,71	54,10	30,89	29,93	30,97	12,84	14,36	14,93
Riau	54,85	55,26	53,12	33,14	32,87	34,95	12,00	11,87	11,92
Jambi	62,93	57,94	60,55	26,28	28,08	28,29	10,78	13,98	11,16
Sumatera Selatan	64,91	65,76	62,11	26,11	26,16	26,54	8,98	8,09	11,34
Bengkulu	59,30	56,50	55,13	28,24	28,27	29,28	12,46	15,23	15,59
Lampung	68,06	66,75	67,82	25,36	25,36	24,22	6,58	7,89	7,96
Kep. Bangka Belitung	61,62	57,90	61,59	28,38	29,99	27,53	10,01	12,11	10,88
Kepulauan Riau	38,67	40,74	40,33	46,35	46,01	44,19	14,98	13,25	15,49
DKI Jakarta	32,04	31,54	32,02	43,63	44,30	44,48	24,33	24,17	23,50
Jawa Barat	60,39	60,38	58,19	28,47	28,97	29,06	11,14	10,65	12,75
Jawa Tengah	70,19	70,47	69,73	22,01	21,22	22,54	7,80	8,30	7,73
DI Yogyakarta	49,04	46,81	48,36	35,59	38,78	35,62	15,38	14,41	16,02
Jawa Timur	66,08	65,94	63,11	25,32	25,22	27,09	8,60	8,83	9,80
Banten	52,03	50,60	50,95	34,25	34,11	32,32	13,72	15,29	16,74
Bali	53,77	52,47	49,82	31,88	30,01	34,49	14,35	17,52	15,69
Nusa Tenggara Barat	64,85	66,13	61,66	23,57	22,60	25,53	11,57	11,27	12,81
Nusa Tenggara Timur	71,42	70,69	67,81	19,06	19,69	20,36	9,52	9,62	11,83
Kalimantan Barat	70,08	68,29	68,85	22,18	22,15	21,82	7,74	9,56	9,34
Kalimantan Tengah	65,26	65,69	63,91	24,55	22,90	24,36	10,19	11,41	11,73
Kalimantan Selatan	64,89	65,62	64,05	23,88	24,16	23,89	11,23	10,22	12,06
Kalimantan Timur	44,56	48,42	46,12	41,15	36,69	39,50	14,29	14,90	14,38
Kalimantan Utara	52,58	59,04	54,67	32,73	30,26	29,64	14,69	10,70	15,69
Sulawesi Utara	52,91	53,08	54,11	34,42	32,77	33,15	12,67	14,15	12,74
Sulawesi Tengah	63,66	63,74	62,47	25,37	25,40	25,06	10,96	10,87	12,47
Sulawesi Selatan	58,48	59,17	59,59	25,65	24,70	25,36	15,86	16,13	15,04
Sulawesi Tenggara	58,83	52,95	54,52	26,58	27,59	29,30	14,59	19,46	16,17
Gorontalo	66,68	64,04	62,84	22,30	24,80	22,99	11,03	11,16	14,17
Sulawesi Barat	68,95	69,14	69,38	20,42	21,39	20,04	10,64	9,47	10,57
Maluku	51,16	49,64	47,49	34,90	35,19	38,01	13,93	15,17	14,49
Maluku Utara	56,97	53,38	53,99	30,33	31,61	31,38	12,70	15,02	14,63
Papua Barat	52,59	52,84	49,29	31,77	31,02	32,65	15,64	16,14	18,06
Papua	74,75	68,89	68,88	18,67	23,43	22,28	6,58	7,68	8,84
Indonesia	60,74	60,39	59,07	28,19	28,15	28,74	11,07	11,46	12,19

**Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2015–2016**

Lapangan Usaha	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 436 194	928 885	1 336 045	1 523 818	1 047 969	1 429 297	1 781 420	1 103 752	1 655 121
2	3 872 536	2 517 529	3 788 685	4 214 473	4 286 521	4 218 301	4 133 670	5 092 504	4 197 869
3	1 986 039	1 659 683	1 867 965	2 209 949	1 707 159	2 030 841	2 576 625	1 967 911	2 353 052
4	2 691 569	2 586 389	2 683 298	2 705 610	3 179 019	2 757 952	3 414 470	2 961 208	3 370 398
5	1 863 850	3 086 550	1 912 211	2 162 219	2 354 215	2 171 399	2 330 355	4 305 487	2 397 089
6	1 762 125	1 514 322	1 665 483	1 899 561	1 560 461	1 766 482	2 391 847	1 716 425	2 128 768
7	2 279 601	2 955 590	2 353 981	2 574 586	2 665 160	2 582 902	3 227 859	2 963 304	3 198 413
8	2 924 713	3 126 545	2 985 563	3 053 468	3 054 401	3 053 769	3 697 167	3 630 725	3 677 156
9	2 618 823	1 991 601	2 317 004	2 674 647	1 967 200	2 325 252	3 048 668	2 313 676	2 682 886
Total	2 177 763	1 863 179	2 069 306	2 347 998	1 877 559	2 180 577	2 755 374	2 192 723	2 552 962

Keterangan lapangan usaha:

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 24. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2015–2016

Lapangan Usaha	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 501 914	1 278 017	1 336 045	1 591 776	1 361 316	1 429 297	1 853 001	1 558 556	1 655 121
2	5 123 186	2 304 921	3 788 685	5 407 317	2 689 077	4 218 301	5 429 109	2 727 615	4 197 869
3	2 031 203	1 314 162	1 867 965	2 193 216	1 553 745	2 030 841	2 548 414	1 848 612	2 353 052
4	2 990 572	1 763 718	2 683 298	2 941 786	2 202 203	2 757 952	3 581 540	2 834 801	3 370 398
5	2 144 054	1 437 398	1 912 211	2 409 203	1 742 891	2 171 399	2 650 461	1 980 784	2 397 089
6	1 789 577	1 082 132	1 665 483	1 864 106	1 360 387	1 766 482	2 276 436	1 580 558	2 128 768
7	2 559 582	1 623 623	2 353 981	2 782 816	1 900 424	2 582 902	3 533 707	2 263 882	3 198 413
8	3 185 749	1 685 086	2 985 563	3 228 556	1 909 525	3 053 769	3 882 359	2 304 652	3 677 156
9	2 487 247	1 881 596	2 317 004	2 468 894	2 003 159	2 325 252	2 862 490	2 278 079	2 682 886
Total	2 283 167	1 526 711	2 069 306	2 372 517	1 723 592	2 180 577	2 796 850	1 996 960	2 552 962

Keterangan lapangan usaha:

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

**Lampiran 25. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2015–2016**

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 773 896	1 787 016	1 778 391	2 036 725	1 690 292	1 918 693	2 344 283	2 006 465	2 223 969
Sumatera Utara	1 921 490	1 622 687	1 823 098	2 035 296	1 709 866	1 921 405	2 129 991	1 760 179	2 000 121
Sumatera Barat	2 027 064	1 847 869	1 956 370	2 163 093	1 823 054	2 013 917	2 432 409	2 210 799	2 343 454
Riau	2 358 134	1 757 006	2 175 996	2 475 446	1 924 824	2 307 730	2 677 094	2 192 451	2 523 061
Jambi	2 064 673	1 665 541	1 937 969	2 096 419	1 739 374	1 976 810	2 249 627	1 670 459	2 066 856
Sumatera Selatan	2 020 600	1 763 070	1 935 432	2 143 652	1 574 813	1 958 713	2 228 796	1 862 225	2 097 351
Bengkulu	2 158 843	1 779 482	2 014 786	2 362 927	1 545 837	2 048 409	2 346 730	1 820 038	2 150 361
Lampung	1 903 514	1 708 063	1 843 739	1 957 941	1 757 295	1 889 021	1 989 999	1 602 041	1 847 210
Kep. Bangka Belitung	2 174 227	1 863 983	2 079 250	2 368 320	1 895 824	2 214 195	2 689 312	1 875 965	2 424 225
Kepulauan Riau	3 672 507	2 939 167	3 454 228	3 948 188	2 570 760	3 503 427	3 546 786	2 756 388	3 270 224
DKI Jakarta	3 310 971	2 615 452	3 048 357	3 445 794	2 761 999	3 180 389	4 247 811	3 533 865	3 980 808
Jawa Barat	1 976 385	2 335 743	2 087 292	2 333 032	1 941 565	2 203 838	2 945 306	2 472 189	2 788 634
Jawa Tengah	1 712 887	1 350 743	1 565 697	1 911 745	1 390 768	1 703 709	2 125 201	1 516 207	1 875 026
DI Yogyakarta	1 948 779	1 616 417	1 822 676	2 464 870	1 515 713	2 057 444	2 158 318	1 688 333	1 975 721
Jawa Timur	1 853 653	1 361 608	1 676 543	1 920 114	1 546 782	1 785 555	2 281 050	1 870 582	2 129 937
Banten	2 675 104	2 264 734	2 545 044	2 649 809	2 644 309	2 647 970	3 755 778	3 111 622	3 531 518
Bali	2 210 083	1 660 316	1 999 473	2 417 819	1 992 098	2 251 544	2 995 817	2 476 151	2 788 711
Nusa Tenggara Barat	2 048 074	1 557 874	1 872 931	2 269 907	1 558 092	1 976 154	2 402 955	1 555 353	2 044 877
Nusa Tenggara Timur	1 983 616	1 743 378	1 894 673	2 098 751	1 777 867	1 972 860	2 249 943	1 976 277	2 143 074
Kalimantan Barat	2 179 926	1 829 452	2 070 443	2 204 623	1 883 693	2 104 459	2 313 083	1 940 815	2 204 481
Kalimantan Tengah	2 365 116	1 853 790	2 215 984	2 459 140	2 038 975	2 334 626	2 785 687	2 441 719	2 687 091
Kalimantan Selatan	2 346 102	2 007 191	2 238 112	2 427 967	1 907 965	2 255 275	2 705 381	2 304 469	2 574 148
Kalimantan Timur	3 320 101	1 927 883	2 955 113	3 561 378	2 223 521	3 180 944	4 101 490	2 669 980	3 719 982
Kalimantan Utara	2 802 757	2 462 232	2 704 530	2 945 516	2 219 114	2 764 629	3 331 572	2 792 301	3 176 765
Sulawesi Utara	2 281 307	2 277 019	2 279 713	2 399 186	2 559 365	2 457 069	2 966 176	2 668 054	2 849 993
Sulawesi Tengah	2 098 129	1 729 425	1 965 819	2 414 500	1 761 424	2 176 761	2 373 119	2 159 951	2 290 133
Sulawesi Selatan	2 221 299	1 822 779	2 067 582	2 443 451	1 823 226	2 200 159	2 899 666	1 834 574	2 494 064
Sulawesi Tenggara	2 306 027	2 037 046	2 209 883	2 711 338	1 921 544	2 390 548	3 001 515	2 202 391	2 696 009
Gorontalo	1 850 558	1 827 964	1 840 827	2 210 920	1 927 716	2 088 940	2 354 161	2 219 026	2 291 309
Sulawesi Barat	2 221 546	1 909 725	2 105 908	2 232 540	2 107 957	2 188 318	2 347 998	1 775 389	2 144 605
Maluku	2 507 328	2 277 195	2 425 067	2 638 982	2 285 220	2 516 875	2 637 637	2 148 540	2 443 695
Maluku Utara	2 274 432	2 164 012	2 237 840	2 299 553	2 339 775	2 313 507	2 742 541	2 147 439	2 538 918
Papua Barat	2 842 773	2 613 781	2 780 917	2 963 867	2 534 250	2 847 164	2 993 485	2 595 785	2 865 109
Papua	3 397 680	2 479 195	3 178 084	3 436 229	2 612 972	3 227 277	3 650 425	3 035 337	3 487 512
Indonesia	2 177 763	1 863 179	2 069 306	2 347 998	1 877 559	2 180 577	2 755 374	2 192 723	2 552 962

**Lampiran 26. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2015–2016**

Provinsi	Agustus 2015			Februari 2016			Agustus 2016		
	Perkota-an	Perdesa-an	Total	Perkota-an	Perdesa-an	Total	Perkota-an	Perdesa-an	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2 197 496	1 443 444	1 778 391	2 042 473	1 815 658	1 918 693	2 423 490	2 072 919	2 223 969
Sumatera Utara	1 940 959	1 558 973	1 823 098	2 032 773	1 691 882	1 921 405	2 068 117	1 860 891	2 000 121
Sumatera Barat	2 086 542	1 737 457	1 956 370	1 996 812	2 037 824	2 013 917	2 322 804	2 370 970	2 343 454
Riau	2 622 215	1 733 784	2 175 996	2 687 055	1 852 409	2 307 730	2 795 751	2 229 022	2 523 061
Jambi	2 447 966	1 578 000	1 937 969	2 633 145	1 611 182	1 976 810	2 338 897	1 894 979	2 066 856
Sumatera Selatan	2 423 994	1 372 361	1 935 432	2 320 928	1 539 253	1 958 713	2 537 005	1 700 070	2 097 351
Bengkulu	2 340 912	1 646 184	2 014 786	2 405 690	1 756 234	2 048 409	2 374 259	1 976 355	2 150 361
Lampung	2 158 980	1 561 471	1 843 739	2 101 773	1 738 647	1 889 021	2 002 831	1 727 976	1 847 210
Kep. Bangka Belitung	2 095 268	2 048 777	2 079 250	2 327 262	2 023 100	2 214 195	2 556 769	2 177 186	2 424 225
Kepulauan Riau	3 531 497	2 617 116	3 454 228	3 631 612	2 090 952	3 503 427	3 334 746	2 579 739	3 270 224
DKI Jakarta	3 048 357	-	3 048 357	3 180 389	-	3 180 389	3 980 808	-	3 980 808
Jawa Barat	2 253 415	1 164 738	2 087 292	2 320 107	1 587 232	2 203 838	2 929 204	2 055 337	2 788 634
Jawa Tengah	1 648 336	1 411 637	1 565 697	1 759 582	1 607 370	1 703 709	2 001 854	1 641 548	1 875 026
DI Yogyakarta	1 924 408	1 352 344	1 822 676	2 162 590	1 588 954	2 057 444	2 019 801	1 772 545	1 975 721
Jawa Timur	1 859 531	1 236 448	1 676 543	1 934 626	1 448 776	1 785 555	2 222 655	1 934 941	2 129 937
Banten	2 741 305	1 376 496	2 545 044	2 823 283	1 786 037	2 647 970	3 818 124	2 181 289	3 531 518
Bali	2 156 022	1 469 364	1 999 473	2 330 522	1 990 264	2 251 544	2 917 164	2 339 820	2 788 711
Nusa Tenggara Barat	2 145 332	1 424 524	1 872 931	2 137 186	1 655 444	1 976 154	2 195 200	1 819 100	2 044 877
Nusa Tenggara Timur	2 220 524	1 570 935	1 894 673	2 332 006	1 674 748	1 972 860	2 437 901	1 932 002	2 143 074
Kalimantan Barat	2 244 474	1 900 385	2 070 443	2 308 198	1 893 895	2 104 459	2 435 591	2 013 540	2 204 481
Kalimantan Tengah	2 533 614	1 965 576	2 215 984	2 660 932	2 051 834	2 334 626	3 020 482	2 415 841	2 687 091
Kalimantan Selatan	2 438 399	1 944 909	2 238 112	2 541 663	1 815 004	2 255 275	2 980 228	1 973 875	2 574 148
Kalimantan Timur	3 120 894	2 434 708	2 955 113	3 461 316	2 461 356	3 180 944	4 097 407	2 679 192	3 719 982
Kalimantan Utara	2 730 019	2 652 362	2 704 530	2 873 326	2 543 117	2 764 629	3 300 669	2 939 805	3 176 765
Sulawesi Utara	2 409 225	2 023 961	2 279 713	2 558 178	2 278 830	2 457 069	2 913 686	2 734 622	2 849 993
Sulawesi Tengah	2 176 824	1 758 960	1 965 819	2 590 181	1 840 649	2 176 761	2 779 708	1 901 620	2 290 133
Sulawesi Selatan	2 370 081	1 579 544	2 067 582	2 552 144	1 635 934	2 200 159	2 857 495	1 995 125	2 494 064
Sulawesi Tenggara	2 484 581	1 903 004	2 209 883	2 787 996	1 958 506	2 390 548	2 840 036	2 579 610	2 696 009
Gorontalo	2 150 592	1 485 382	1 840 827	2 283 589	1 830 305	2 088 940	2 547 871	2 029 483	2 291 309
Sulawesi Barat	2 178 306	2 065 005	2 105 908	2 557 565	1 979 567	2 188 318	2 233 315	2 094 964	2 144 605
Maluku	2 695 540	2 036 190	2 425 067	2 844 774	2 129 839	2 516 875	2 599 779	2 266 387	2 443 695
Maluku Utara	2 366 599	2 127 703	2 237 840	2 658 314	2 075 453	2 313 507	2 851 939	2 295 060	2 538 918
Papua Barat	2 773 594	2 788 652	2 780 917	2 973 158	2 740 971	2 847 164	2 693 668	2 993 798	2 865 109
Papua	3 370 081	2 834 805	3 178 084	3 279 408	3 138 119	3 227 277	3 541 651	3 425 579	3 487 512
Indonesia	2 283 167	1 526 711	2 069 306	2 372 517	1 723 592	2 180 577	2 796 850	1 996 960	2 552 962

Batasan Kegiatan Informal

Lampiran 27. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal/Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan: F = Formal

INF = Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

